



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI  
DENGAN DIRJEN BINA MARGA DAN DIRJEN BINA KONSTRUKSI  
KEMENTERIAN PUPR RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke- : 12 (Dua belas)  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2022  
Waktu : Pukul 15.55 WIB s.d. 20.40 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)  
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual Zoom  
*Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si (F-PDIP) – Ketua Komisi V  
DPR RI
- Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai  
bulan Agustus 2022;  
2. Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan  
program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra  
Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA 2023
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR  
RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:  
50 dari 55 orang Anggota dengan rincian:  
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)  
11 dari 11 orang Anggota  
1. Lasarus, S.Sos., M.Si.  
2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.  
3. Mochamad Herviano  
4. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.  
5. Sukur H. Nababan, S.T.  
6. Ir. Sudjadi  
7. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.  
8. Sri Rahayu  
9. H. Irmadi Lubis  
10. Ir. Effendi Sianipar  
11. Harvey B. Malaihollo  
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)  
5 dari 8 orang Anggota  
1. Ir. Ridwan Bae  
2. Drs. Hamka B Kady, M.S.  
3. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.  
4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.

5. Muhammad Fauzi, S.E.
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA  
(F-GERINDRA)  
7 dari 7 orang Anggota
  1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
  2. Ir. Sumail Abdullah
  3. Sudewo, S.T., M.T.
  4. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
  5. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
  6. Drs. H. Mulyadi, M.MA.
  7. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)  
6 dari 6 orang Anggota
  1. Roberth Rouw
  2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
  3. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
  4. Drs. H. Soehartono, M.Si.
  5. Sri Wahyuni
  6. Drs. Fadholi, M. Ikom.
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)  
6 dari 6 orang Anggota
  1. H. Ruslan M. Daud
  2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
  3. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
  4. Sofyan Ali, S.H.
  5. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
  6. H. Syafiuddin, S.Sos.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)  
5 dari 5 orang Anggota
  1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
  2. Willem Wandik
  3. drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.
  4. Lasmi Indaryani, S.E.
  5. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)  
4 dari 5 orang Anggota
  1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
  2. Ir. H. Sigit Sosiantomo
  3. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.
  4. KH. Toriq Hidayat, Lc.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

5 dari 5 orang Anggota

1. H.A. Bakri H. M., S.E.
2. Athari Ghauthi Ardi
3. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
4. H. Boyman Harun, S.H.
5. Mesakh Mirin, SKM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN/PEMERINTAH:

1. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI (Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc.)
2. Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR RI (Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT/F- PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:**

Baik, kita mulai rapat kita pada sore hari ini. Pertama, kita mohon maaf Pak Dirjen Bina Marga dan Bina Konstruksi menunggu begitu lama, karena salah satu pekerjaan yang paling tidak enak itu menunggu, Pak, apalagi menunggu sesuatu yang tidak pasti. Baik, kita mulai, Bapak-Ibu sekalian.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,**

**Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI,  
Yang terhormat Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),  
Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia,  
Hadir pada rapat hari ini juga seluruh Kepala Balai Bina Marga dari  
seluruh Indonesia dan Kepala P2JK ya, di seluruh Indonesia juga hadir  
ya, dari seluruh Provinsi,**

**Bapak-Ibu sekalian,**

Rapat ini dihadiri baik secara fisik maupun juga virtual. Menurut informasi dari Sekretariat, rapat ini dihadiri, wah ini agak *anu* ini, agak *surprise* saya, 50 orang anggota ya, fisik 30 dan 20 secara virtual. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat ini sudah memenuhi kuorum. Dan sesuai dengan Pasal 276 ayat (1), Rapat Dengar

Pendapat Komisi V ini dengan Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 16.00 WIB)**

Kami ucapkan terima kasih kepada saudara Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR beserta jajaran, yang telah menghadiri undangan rapat kami pada siang hari ini. Sekali lagi, saya menyampaikan permohonan maaf, Pak, karena rapat tadi dengan Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan agak sedikit panjang ya, dan akhirnya menabrak waktu. Yang harusnya tadi jam 14 kita sudah mulai, untuk agenda sesi dengan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi kita mundur sampai ke jam 16, sekarang. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi yang kami hormati,  
Beserta seluruh jajaran dan seluruh Kepala Balai,  
Baik Kepala Balai Bina Marga maupun Kepala Balai Bina Konstruksi atau  
kita lebih kenal dengan P2JK yang hadir pada rapat kali ini secara virtual,**

Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 yang lalu, telah disepakati beberapa hal diantaranya: pagu nota keuangan dalam RAPBN tahun 2023 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah sebesar 125,22 triliun. Dari alokasi tersebut, anggaran untuk Dirjen Bina Marga adalah sebesar 49,31 triliun, yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan antara lain:

- Pembangunan jalan sepanjang 489,1 km
- Pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 10,3 km
- Peningkatan aksesibilitas *flyover* dan *underpass* sepanjang 2,25 km, dan
- Peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 49 km.

Sementara realisasi anggaran Dirjen Bina Marga dalam RAPBN, *eh* dalam APBN Tahun 2022, *sorry*, per Agustus 2022 adalah sebesar 35,76%. Selanjutnya, Dirjen Bina Konstruksi mendapatkan alokasi sebesar, alokasi anggaran sebesar 567,63 miliar, ini untuk RAPBN tahun 2023, yang akan dipergunakan untuk kegiatan, di antaranya:

- Pembinaan pengadaan jasa konstruksi,
- Pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi, dan
- Pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi, dan
- Pembinaan sistem manajemen keselamatan konstruksi.

Sementara realisasi anggaran Dirjen Bina Konstruksi dalam APBN Tahun 2022 per Agustus 2022 adalah sebesar 53,39 triliun, *eh* 53,39%, *sorry*. Sejalan dengan itu, dalam kesempatan ini kami tegaskan kembali anggaran,

eh kami tegaskan kembali agar dalam proses penyusunan pagu ini, baik Bina Marga maupun Dirjen Bina Konstruksi, untuk kiranya dapat mengakomodir dan juga memasukkan program-program yang sudah kita bicarakan bersama ya, pendapat, saran, masukan, dari Komisi V DPR RI.

Selanjutnya, berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian dari Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi, antara lain:

1. Perlu peningkatan upaya pemeliharaan jalan nasional di daerah, yang tingkat kemantapannya belum maksimal.
2. Perlu meningkatkan evaluasi terhadap setiap tahapan proses tender dalam mewujudkan pelaksanaan tender yang lebih transparan dan akuntabel.
3. Perlu meningkatkan keterlibatan penyedia jasa konstruksi lokal, utamanya untuk proyek strategis nasional di daerah.

Dan yang terakhir, sebagaimana sudah kita atur dalam undang-undang, Perubahan Undang-Undang 38 tentang 2004 Tentang Jalan yang menjadi UU No. 2 Tahun 2022, ya, ada pasal yang mengatur tentang jalan daerah, Pak Dirjen, ya, ini hendaknya juga teman-teman sekalian, terkait jalan daerah, tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan dalam pertemuan informal bahwa Inpresnya belum selesai, masih ada satu pasal yang masih terjadi perbedaan pendapat antara Bappenas dan Kementerian Keuangan. Dan mudah-mudahan ini segera bisa diselesaikan. Pak Menteri juga menyampaikan kepada kita kemarin secara informal bahwa dana yang tersedia baru kurang lebih ada Rp25 triliun. Tapi sebetulnya ini dibutuhkan kurang lebih Rp70 triliun untuk jalan daerah.

Oleh karenanya, melalui forum yang terhormat ini, kita fraksi masing-masing, Pak, ya, mendorong melalui Badan Anggaran, hendaknya melalui Badan Anggaran ini bisa dialokasikan anggaran minimal sebesar 70 triliun baru mungkin bisa mengakomodir atau bersama-sama kita dengan Kementerian PU dan usulan teman-teman dari Komisi V dan Daerah bisa diakomodir secara baik oleh Dirjen Bina Marga yang menangani ini.

**Baik, Bapak-Ibu sekalian,  
Teman-teman Pimpinan,  
Pak Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi yang kami hormati,  
beserta seluruh jajarannya.**

Demikian pengantar rapat pada siang hari ini dalam RDP dengan Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi.

Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan secara berurutan, dimulai dari Dirjen Bina Marga, selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Dirjen Bina Konstruksi untuk dapat menyampaikan bahan paparan rapat sesuai dengan undangan materi, sesuai dengan undangan yang sudah kami sampaikan. Kami persilakan, silakan Dirjen Bina Marga terlebih dahulu.

**DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):**

Baik, terima kasih.

**Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi V,  
Serta Para Anggota Komisi V,  
Bapak-Ibu sekalian,**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang kami hormati Bapak Ketua,**

Sebelum kami mulai pemaparan kami, izinkan kami melaporkan sesuai dengan permintaan Pimpinan, bahwa Kepala Balai dihadirkan secara *online*. Kami sudah men-*check* sampai saat terakhir, kami laporkan dari 33 Kepala Balai dan Balai Besar Pelaksanaan, semuanya hadir kecuali Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara dan Wamena, karena masalah kesehatan, tapi tetap ada wakilnya.

Baik, yang pertama, izinkan kami untuk melaporkan progres pelaksanaan kegiatan Dirjen Bina Marga Tahun Anggaran 2022. Kami sampaikan kronologisnya, usulan pagu indikatif 68,10 triliun, kemudian pagu indikatifnya adalah 39,70 triliun. Pagu anggaran 39,70 triliun, kemudian pagu alokasi 39,70 triliun, setelah revisi menjadi 45,84 triliun. Ini dikarenakan adanya total tambahan anggaran senilai 6,14 triliun yaitu bencana alam 3,72 triliun kemudian, *oh* mohon maaf, dari BA-BUN Rp93,72 triliun, PHLN 0,30 triliun dan luncturan SBSN 2,12 triliun. Kemudian ada *automatic adjustment* tahap I tahap II senilai 3,47 triliun.

Baik, kemudian pelaksanaan kegiatan kami sampaikan realisasi keuangan sebesar 35,76% dan realisasi fisik sebesar 43,60%. Ini ada beberapa masalah kami laporkan, Pimpinan dan Anggota DPR yang kami hormati, salah satunya adalah kita punya masalah dengan adanya kenaikan harga BBM dan aspal. Jadi ini sudah cukup banyak kontrak yang akhirnya putus dan kemudian juga yang lain *slowdown*, bahkan ada kontrak pekerjaan yang baru ditetapkan karena proses lelangnya lama sehingga harganya masih harga lama, pada waktu mau kontrak, kontraktornya keberatan untuk menandatangani kontrak.

*Nah*, kami sudah melakukan upaya ini, dengan mengusulkan adanya penyesuaian harga. Sudah dirapatkan, saya kira Pak Menteri sudah melaporkan, sudah dirapatkan di Menko, yang pada prinsipnya setuju dan kami masih menunggu masalah ini dinaikkan ke Ratas. Jadi ini kami agak apa namanya, kesulitan memang, untuk mendorong para penyedia jasa di lapangan.

Kami laporkan juga, nanti penyesuaian harga itu tidak akan ada anggaran tambahan, Pak. Tapi akan kita optimasi dari yang ada, dari sisa lelang dari dan kegiatan-kegiatan yang dibatalkan.

Kemudian kami laporkan program padat karya sebesar 34,12% senilai 1,472 triliun dengan penyerapan tenaga kerja 48.498 orang.

Kemudian untuk dukungan acara internasional, untuk KTT G20 di Bali, pagunya sebesar 391,68 miliar dengan progres fisik 75,62%. Kemudian TMII, pagu 127,68 miliar dengan progres fisik 97,88%. Mandalika, pagu 359,73 miliar, progres fisik 79,62%. Kemudian Tanamori dengan pagu sebesar 487,16 miliar, progres fisik sebesar 55,92%.

Kami laporkan juga bahwa kami ditarget pekerjaan dukungan ini, terutama untuk KTT G20 Bali dan juga yang lainnya, karena ini juga merupakan bagian dari rangkaian acara, G20-nya sendiri akan dilaksanakan bulan November.

Kemudian untuk belanja modal dan barang adalah 44,815 triliun, terdiri dari belanja tingkat komponen dalam negeri sebesar 92,50 triliun, 92,50% atau sejumlah 41,45 triliun dan belanja impor sebesar 7,5% atau sejumlah 3,36 triliun, jadi TKDN kita cukup tinggi.

Kemudian kami laporkan juga, tambahan anggaran IKN senilai 2,11 triliun di 2022 ini, yang *alhamdulillah* sebagian kegiatannya pada hari Senin kemarin, sudah tanda tangan kontrak. Untuk yang dimulai tahun ini adalah penggunaan jalan logistik IKN, kemudian penggunaan jalan dalam KIPP, preservasi jalan logistik, kemudian preservasi ruas jalan provinsi sebelumnya ini yaitu dari Simpang IHM, Simpang Riko, jembatan Pulau Balang bentang pendek. Kemudian pembangunan ruas jalan Simpang IHM, Simpang Riko, sampai ke jembatan Pulau Balang bentang pendek 2x2 lajur. Kemudian pembangunan jalan bebas hambatan, kemudian duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek, pembangunan jalan *bypass* Sepaku dan pembangunan dermaga logistik, bukan dermaga untuk umum.

Upaya percepatan realisasi anggaran ini adalah kita saat ini dalam proses penyelesaian revisi anggaran. Ini kita ada beberapa revisi anggaran yang harus kita lakukan. Jadi ini mohon maaf, tidak bisa cepat dilakukan, karena antri di Kementerian Keuangannya. Sekarang ini yang kita prioritaskan adalah revisi anggaran untuk IKN dan untuk *automatic adjustment*, ini yang diblokir. Kemudian kita juga kerjasama dengan Dirjen Bina Konstruksi, berusaha mempercepat pengadaan barang untuk IKN ini, Pak.

Kemudian kita coba tingkatkan pengawasan dan penyelesaian masalah-masalah yang menghambat di lapangan. Kemudian penyelesaian kegiatan Padat Karya dan percepatan pemanfaatan pagu atau sisa lelang, yang tadi kami sampaikan, nanti akan kita alokasikan utamanya adalah untuk membayar penyesuaian, penyesuaian yang sedang kita usulkan. Ini memang sangat penting sekali untuk kami, karena kalau tanpa adanya penyesuaian ini, progres

di lapangan sangat berat untuk penyedia jasa. Jadi kami harapkan ini memang bisa kami segera peroleh payung hukumnya, Pak, dari Ratas, sehingga bisa kami tindak lanjuti.

Kemudian kami laporkan, Pak, yang untuk anggaran 2023, kami sampaikan kronologis anggarannya. Yang pertama adalah pagu indikatif 2023 senilai 62,11 triliun usulan pagunya, kemudian pagu indikatifnya 40,25 triliun. Kemudian pagu anggarannya terakhir kami terima adalah 49,31 triliun, 49,31 triliun itu meliputi:

- Program dukungan manajemen sebesar 2,3 triliun atau 4,81%.
- Program infrastruktur konektivitas sebesar 46,94 triliun. Terdiri dari:
  - Dukungan turbin WAS, kemudian PMTD, bencana alam, kemudian kegiatan pusat.
  - Kemudian pembangunan jalan 8,53 triliun.
  - Pembangunan jembatan dan *flyover underpass* sebesar 4,36 triliun.
  - Preservasi jalan dan jembatan 25,44 triliun, terdiri dari rutin jalan dan jembatan.
  - Kemudian rehabilitasi, rekonstruksi, pelebaran jalan dan penggantian jembatan dan jalan bebas hambatan sebesar 7,90 triliun.

Kami sampaikan pagu anggaran sebesar 49,311 triliun, terdiri dari dua program yaitu program dukungan manajemen sebesar 2,370 triliun atau 4,81% dan program infrastruktur konektivitas sebesar 46,941 triliun, 95,19%, yaitu:

- Kegiatan IKN 8,733 triliun.
- Kemudian *committed* sebesar 15,906 triliun, dengan rincian yang bersumber dari SBSN sebesar 12,290 triliun, kemudian dana *loan* PHLN sebesar 2,091 triliun.
- Kemudian pendamping sebesar 0,30 triliun dan lanjutan, *multiyears* sebesar 1,195 triliun.

Adapun *non-committed* sebesar 22,302 triliun, terdiri dari kegiatan *non-committed* yang bersifat wajib seperti jembatan gantung, lahan, bencana alam sebesar 1,016 triliun. Kemudian sisanya, sebesar 12,48 triliun dialokasikan untuk infrastruktur jalan sebesar 8,456 triliun, infrastruktur jembatan 2,925 triliun, jalan bebas hambatan 1,394 triliun. Kemudian rutin jalan dan jembatan, revisi drainase sebesar 5,515 triliun. Kemudian *flyover underpass*, terowongan sebesar 0,528 triliun, dan dukungan teknis balai dan turbinwas pusat sebesar 2,468 triliun, dalam rangka mempertahankan kemantapan jalan nasional.

Target prioritas Tahun Anggaran 2023:

- Pertama adalah infrastruktur jalan, 25,94 triliun,
- Infrastruktur jembatan, 6,39 triliun,
- Kemudian *flyover underpass* terowongan sebesar, 0,91 triliun,
- Konektivitas jalan bebas hambatan, 7,98 triliun.
- Preservasi rutin jalan dan jembatan nasional serta revitalisasi drainase dan jembatan gantung, 5,8 triliun,
- dan dukungan manajemennya, 2,37 triliun.



Rencana program Padat Karya adalah sebesar 4,78 triliun yang dalam hubungannya dengan prioritas, itu adalah di preservasi rutin jalan dan jembatan nasional serta revitalisasi drainase dan jembatan gantung, ini kita harapkan bisa menyerap tenaga 80.000 orang.

Kemudian total tambahan, rencana tambahan IKN 2023 yaitu 8,373 triliun dengan rincian:

- Pembangunan jalan kerja logistik, 0,25 triliun,
- Pembangunan jalan dalam KIPP, 1,52 triliun,
- Preservasi jalan logistik IKN, 1,13 triliun,
- Kemudian pembangunan jalan bebas hambatan, 5,17 triliun,
- Duplikasi jembatan bentang pendek Pulau Balang, 0,33 triliun,
- Jalan *bypass* pasar Sepaku, 0,17 triliun,
- Kemudian pembangunan dermaga untuk keperluan logistik, 6,16 triliun.

Kami sampaikan, tidak akan kami paparkan di sini, tapi dalam *hand out* yang Bapak-Bapak sudah sampaikan, itu di lampirannya ada program-program, utamanya ini adalah yang kami sampaikan adalah program-program yang *committed*. Nah, kami sekarang dalam proses menampung usulan dari Bapak dan Ibu sekalian, dan kami sudah instruksikan Kepala Balai untuk mengontak Bapak dan Ibu sekalian, memastikan lokasinya. Karena kadang-kadang lokasinya tidak jelas dalam usulan, dan juga nanti di-*check readiness* nya kemudian nanti kami akan lakukan pendalaman dari situ, untuk akomodasi dianggarkannya.

Kami laporkan juga, Pak, bahwa kami memahami adanya rencana perubahan anggaran, rencana Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan pergeseran anggaran. Itu adalah anggaran-anggaran yang sifatnya adalah untuk preservasi rutin. Jadi ini sifatnya *mandatory* bagi kami, jadi kalau itu digeserkan, tentu kami akan melakukan pergeseran internal di Bina Marga dari alokasi-alokasi lainnya. Karena kami *enggak* mungkin meninggalkan preservasi rutin yang memang system, cara kita mengerjakannya dengan swakelola.

Kami membuka, tapi saya kira tidak akan kami bahas secara detail di sini, untuk melakukan sedikit perubahan operasional Padat Karya. Sehingga itu bisa mengakomodasi aspirasi Bapak dan Ibu sekalian, dalam batasan-batasan *output* yang sudah kita tetapkan. Intinya kita terbuka untuk diskusi masalah ini, tapi ini nanti saya kira secara detail kita akan bahas pada kesempatan yang lain.

Kemudian untuk jalan daerah, kami sampaikan, tadi sudah disampaikan Pak Ketua, kita sudah sekarang ini memang secara internal di Bina Marga sesuai dengan amanat undang-undang, bahwa kita memiliki ruang untuk intervensi kalau dianggap penting dan daerahnya tidak mampu untuk penanganan jalan daerah. Kita sudah melakukan koordinasi yang cukup intensif dengan Bappenas ya dan Bappenas sudah mengajukan usulan Inpresnya. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa ada satu pasal di Inpres itu yang masih perlu disepakati antara Bappenas dengan Kementerian

Keuangan. Jadi setelah Inpres selesai, nanti baru kita akan melakukan pengajuan atau pembahasan soal anggarannya. Jadi masih ada dua *step* lagi, saya kira untuk penanganan Inpres jalan daerah.

Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Pak Ketua, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT/F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

*Wa'alaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh,*

Selanjutnya kami persilakan ke Bapak Dirjen Bina Konstruksi. Silakan, Pak.

**DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR (Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):**

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi V DPR RI,  
Bapak Ibu Anggota Komisi V DPR RI,**

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom,  
Bapak Ibu yang saya hormati,**

Izinkan kami melaporkan, bahwa hadir bersama secara *offline* ini Pejabat Tinggi Pratama setingkat Eselon II dan juga secara *online*, Kepala Balai BP2JK dan BJKW di seluruh provinsi, ini semua hadir, Pak.

**Bapak-Ibu yang saya hormati,**

Yang seperti kita ketahui anggaran DJBK untuk tahun 2022 ini total pagunya kurang lebih 600 juta, dengan program dukungan manajemen serta program advokasi. *Nah*, ini kalau *breakdown*-nya adalah kurang lebih seperti ini, di mana dukungan manajemen kurang lebih sebesar 524 miliar. Sementara untuk program vokasi ini ada blokir *automatic adjustment* yang pertama 75 miliar dan 26, yang kedua.

Untuk revisi yang terakhir ini menjadi pagunya 649 miliar, di mana penambahan ini akibat ada penambahan dukungan manajemen sebesar 49,3 miliar, itu untuk anggaran untuk IKN, jadi peningkatan kompetensi dengan tenaga kerja konstruksi yang ada di IKN. Dan penambahan belanja pegawai sebesar 10,6 miliar, ini terkait dengan untuk gaji dan tunjangan CPNS yang baru.

Tambahan anggaran untuk mendukung IKN tahun 2022 ini dengan rincian kurang lebih total anggaran sebesar 38,76 miliar, di mana untuk manajemen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini sebesar 2 miliar.

Kemudian untuk honor Pokja Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan PMK Menteri Keuangan No. 60/2021, honor pokja kurang lebih 1,8 miliar. Kemudian yang terakhir adalah pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi sebesar 34,96 miliar, di mana ini kegiatannya dilaksanakan di 4 balai, dengan pusat kegiatannya berada di IKN untuk tenaga terampil, juga untuk tenaga operator dan tenaga ahli.

Untuk progres keuangan dan fisik, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ini ada di peringkat 2, dengan realisasi progres keuangan sebesar 53,39% dan fisiknya 56,91%.

### **Bapak-Ibu yang saya hormati,**

Untuk capaian pelatihan dan sertifikasi, ini dari tahun 2022 target yang semula 81.200 orang ini berubah menjadi 56.000 orang, di mana *breakdown*-nya untuk tenaga kerja konstruksi reguler 31.200 orang, ini menjadi 17.800 orang. Dan ini realisasinya sudah mencapai 16%, yaitu 2.896 orang. Sementara untuk tenaga konstruksi di IKN, ini adalah tugas tambahan sebanyak 9.300 orang untuk 2022 ini. Realisasinya, kemarin sudah dilaksanakan pelatihan minggu lalu di IKN sebesar 1.535 orang, jadi ini untuk realisasi sudah mencapai 16%. Dari total itu, TKK vokasi 50.000 orang, dari target ini menjadi TKK vokasi karena ada *automatic adjustment* yang di mana diblokir, sehingga tinggal 28.990 orang dan ini realisasinya sudah sebesar 30.221 orang, 104%.

Untuk pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dalam mendukung IKN Nusantara, ini telah dilakukan tahap pertama sebanyak 1.535 orang, yang dilakukan 27 Agustus sampai 9 September nantinya. Di mana peserta 1.535 orang itu terdiri dari 817 orang untuk posisi di Provinsi Kalimantan Timur dan sisanya adalah di luar Kalimantan Timur. Untuk rincian pesertanya, ini sesuai dengan yang kami sampaikan, ada dalam bahan untuk diskusi.

Kemudian untuk percepatan pemenuhan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SKKNI, ini untuk SKKNI yang belum ada, baik dari sisi modul dan skemanya, ini kami bekerja sama dengan Kadin untuk pemenuhan ini, di mana lingkup nota kerja sama tersebut adalah pemetaan kebutuhan jabatan kerja. Kemudian penyusun SKKNI ini kurang lebih ada 56 SKKNI yang dikerjasamakan untuk penyusunan modul dan bahan untuk sertifikasi. Di mana ini kami melibatkan *stakeholder* dan pemangku kepentingan yang terkait dengan itu.

Kemudian untuk progres penerbitan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP, ini yang sudah mendapat rekomendasi dari LPJK ini cukup banyak, 154 LSP. Namun, proses untuk mendapat lisensi ini cukup lama dan sulit, sehingga ini lisensi di BNSP ini baru keluar kurang lebih 21, dan yang beroperasi secara penuh ini baru 13 LSP. Sehingga ini perlu ada semacam percepatan untuk proses sertifikasi dari profesi ini.

Kemudian juga dengan telah diterbitkannya Permen PUPR No. 8 tentang Relaksasi kaitan dengan tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung perizinan berusaha, Ini ada beberapa poin yang dilakukan relaksasi, terkait dengan persyaratan penjualan tahunan, kemudian juga peralatan, penanggung jawab klasifikasi, serta penambahan klasifikasi, termasuk relaksasi nilai aset. Dan juga pemenuhan persyaratan untuk ijazah sertifikasi kompetensi kerja. Jadi Permen 8 ini adalah salah satu *bridging* untuk pemenuhan persyaratan yang diatur dalam PP dan juga Perka LKPP.

Kemudian ada progres yang telah dilakukan oleh DJBK terkait dengan *repeat order*. Jadi *repeat order* ini telah dilakukan pembuatan SE PU Menteri PUPR, terkait dengan pengadaan jasa konsultan. Kemudian juga pekerjaan konstruksi yang telah diakomodir dalam Perka LKPP terkait dengan pengadaan barang jasa di IKN. Nah, kami juga ingin membuat SE untuk pekerjaan berulang, *repeat order*, di mana untuk BUJK yang bekerja dengan baik, itu ada kriterianya untuk penilaian, sehingga bisa dilakukan penunjukan yang berulang, dengan batasan dua kali penunjukan.

Terkait dengan eskalasi kenaikan harga, ini yang dikeluhkan oleh teman-teman unor. Ini kami sedang mencoba untuk menyusun formulasi dan surat edarannya, terkait dengan mekanisme eskalasi akibat kenaikan harga BBM. Ini sudah dibahas di Menko, dan ini kami sedang menunggu hasil rapat terbatas ataupun *minute of meeting*-nya yang dibuat sebagai dasar untuk proses pembuatan surat edaran dan kami sudah mengkonsultasikan dengan BPKP untuk terkait dengan formulasinya.

Kemudian sistem manajemen keselamatan kerja di IKN, ini juga telah diterbitkan SE Menteri PUPR No. 10 Tahun 2022, di mana ini nantinya untuk pelaksanaan kegiatan proyek-proyek di IKN, kami akan melaksanakan pengawasan yang cukup ketat melalui Direktorat Keberlanjutan. Sehingga penerapan IHSE ini menjadi suatu keharusan, untuk menjaga keselamatan kerja, baik dari sisi keselamatan, lingkungan, dan juga terkait dengan tata elola yang ada di sana nantinya.

Untuk progres pelaksanaan tender seleksi tahun 2022, ini telah terkontrak kurang lebih 3.122 paket 81,64%, kalau dengan ekuivalen uangnya kurang lebih sebesar 50 triliun. Sementara yang sudah dalam penetapan PBJ ini 2,2 triliun, itu 99 paket, untuk proses lelang masih sebanyak 421 paket dengan nilai 43,8 triliun. Diharapkan, ini di bulan September ini sudah selesai semua. Untuk belum lelang, ini ada 182 paket, ini terutama untuk paket-paket yang didanai oleh *loan* atau *multi years contract*, yang mana *readiness criteria*-nya belum siap dan kami masih menunggu dari unor *by* ABCP untuk proses lebih lanjut. Kalau untuk yang *single years contract*, ini arahan dari Bapak Menteri, sudah tidak bisa untuk diproses lelang lagi, yang belum lelang. Untuk progres tender atau seleksi di IKN, ini kurang lebih penandatanganan kontrak sudah 33 paket dengan nilai 7,1 triliun. Di mana SDA itu 10 paket, Bina Marga 18 paket, Cipta Karya 4 paket dan perumahan 1 paket, dengan nilai total paket semuanya kurang lebih 7,1 triliun.

Untuk penerapan produk dalam negeri di Kementerian PUPR, ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 3/2014, target PDN PUPR itu sebesar 84,9% atau kalau diuangkan 80,48 triliun. Untuk progresnya sendiri ini, perhitungan dari teman-teman unor PPK, bahwa sampai Agustus 2022 ini kurang lebih yang sudah masuk dari data aplikasinya ini *e-mon*, 43,36%. *Nah*, untuk monitoring TKDN ini, pengawasan terkait dengan penggunaan material, bahan produk, melalui *emon.go.id* ini, kita terus kita genjot bersama-sama kerjasama dengan unor ABCP dan juga pengawasan oleh Inspektorat Jenderal.

Untuk program prioritas Dirjen Bina Konstruksi, ini seperti yang ditayangkan, kami untuk kualitas konstruksi ini ada dua program unggulan, yaitu penerapan untuk SMKK dan monev untuk kualitas paket pekerjaan dengan penawaran di bawah 80%. Jadi ini ada tugas tambahan khusus untuk Direktorat Keberlanjutan, kami akan melakukan monev untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di bawah 80%, baik dari sisi kualitas dan ketepatan waktunya.

Kemudian untuk layanan jasa dan usaha ini kaitannya dengan interoperabilitas SIJKT dan portal OSS. Kemudian pendampingan lisensi untuk monev kinerja LSBU dan LSP. Sementara untuk rantai pasok, ini kaitannya dengan registrasi material peralatan konstruksi melalui aplikasi SINPK dan monev untuk TKDN. Dengan itu juga, peningkatan kompetisi TKK ini terkait dengan SKKNI yang seperti kami sampaikan, termasuk modulnya, skema, serta digitalisasi, serta pelatihannya, dan modernisasi PBJ. Modernisasi PBJ ini terkait dengan mendorong untuk pemanfaatan elektronik katalog. Kemudian penerapan sistem informasi PBJ dan juga operasionalisasi elektronik HPS Sipasti, ini sesuai dengan stranas KPK.

Lanjut, ini historis pagu DJBK untuk 2020-2023, mengalami beberapa perubahan yaitu penurunan yang signifikan terkait dengan belanja non-operasional dukungan manajemen. Sehingga ini terkait dengan pelaksanaan tuisi dan pencapaian target mengalami perubahan, lanjut.

Pagu indikatif untuk 2023 yang posisi awal indikatif sebesar 533,8, ini menjadi 567,6 miliar ini terkait dengan penambahan dukungan manajemen yang terkait dengan dukungan IKN, yaitu berupa pelatihan dan sertifikasi untuk tenaga kerja konstruksi yang ada di IKN.

Langsung ke target pembinaan naker konstruksi, ini adalah sebaran untuk pembinaan tenaga kerja, baik yang reguler dan juga vokasional, plus ditambah untuk 4 balai jasa konstruksi wilayah adalah untuk dukungan tenaga kerja konstruksi di ibukota negara yang baru nantinya, lanjut.

Ini ada sedikit permasalahan terkait dengan pelatihan tenaga kerja konstruksi, terutama untuk yang tenaga terampil. Jadi di sini peserta diberikan uang harian selama kegiatan pembekalan dan uji sertifikasi. Dan uang harian itu diberikan berdasarkan PMK No. 60 Tahun 2020, itu kisarannya 85 ribu sampai 130 ribu per orang per hari. Namun ada permasalahan kaitan dengan

uang *transport*, ini ketika audit BPK menjadi temuan, dan ini hampir kita untuk melakukan setor kembali *gitu*, terkait dengan ini. *Nah*, maka itu ada rekomendasi dari BPK bahwa ini tidak diperkenankan, kecuali bisa menunjukkan bukti eviden yang actual, misalnya kalau menggunakan bis, ada bukti karcisnya atau disediakan oleh panitia, bis dari satu titik ke lokasi pelatihan. Jadi tidak bisa diberikan dalam uang dan tanda tangan kwitansi para peserta.

Untuk *breakdown* pagu anggaran, ini mungkin bisa nanti Bapak Ibu lihat di paparan kami, kami tidak akan menjelaskan secara detail untuk menghemat waktu.

Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk bahan diskusi dan mudah-mudahan ada masukan nanti dari Bapak-Ibu untuk perbaikan kinerja dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, demikian yang dapat kami sampaikan.

*Wabillahitaufik walhidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

*Wa'alaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Bapak-Ibu sekalian,**

Demikian penjelasan yang telah disampaikan oleh Para Dirjen.

Selanjutnya kami persilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pendapat dan pertanyaan. Saat ini yang terdaftar kurang lebih 23 orang. Dan yang pertama akan kami serahkan kepada Bapak Soehartono dari Fraksi Partai Nasdem. Silakan Pak Soehartono, siap-siap Pak Irwan Demokrat.

**F – P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):**

*Makasih, Ketua.*

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Saya mengikuti Ketua yang tadi, kita *enggak* ada basa-basi, kelangsungan ini jadi.

**Yang terhormat Pak Dirjen Bina Marga,**

Saya ingin mengusulkan proyek di pelebaran jalan Madiun batas Ponorogo. Usulan saya ini salah satunya didorong oleh permintaan dari teman Anggota Komisi V yang wilayahnya Ponorogo dan dua periode ini sudah melebarkan jalan batas Madiun sampai Kota Ponorogo. *Enggak* lucu kalau itu tidak diteruskan. Proyek yang saya usulkan itu panjangnya 15 kilo, yang 3 kilo

*ndlopo* itu sudah, apa, dua jalur. Yang batas Kota Madiun sampai ke arah Ponorogo 1 ½ kilometer itu sudah dua jalur. Sehingga kalau ajuan saya ini disetujui, untuk pelebaran ini panjangnya 11,5 kilometer. Tujuannya untuk mempersingkat jarak orang-orang Ponorogo yang mau pergi keluar. Karena dengan sempitnya jalan Madiun-Ponorogo, ini untuk menuju ke, apa, *exit* tol di Madiun, itu katakan ke Surabaya 2 jam, dari Madiun ke Ponorogo itu 1 jam lebih, 1 ½ jam lebih. Jadi apa, apa, *crowded*-nya di daerah itu besar. Jadi nanti, ini saya berdasarkan desakan dari Bu Sri Wahyuni dan Pak Ali Mufthi, itu dapil V yang punya wilayah di seputaran jalan itu, itu yang pertama Pak Dirjen.

Yang kedua tadi sudah disinggung oleh Pak Dirjen bahwa kontraktor Bina Marga tahun '22 ini banyak yang *slowdown*, iya, *slowdown*. Jadi memperlambat. Sebenarnya kalau apa, dipercepat, bisa, dan prosentasenya pasti tinggi *gitu* ya. Tapi karena masih menunggu penyesuaian harga yang menjadi harapan para kontraktor itu, ya diperlambat. Oleh karena itu permintaan saya, Pak Dirjen, agar itu diurus serius sehingga cepat keluar. Mengingat waktunya tinggal 4 bulan *nih*, 4 bulan ini kan waktu. Kontraktor itu habisnya paling tidak pasti 15 Desember *gitu*, jadi waktunya tinggal sedikit, Pak. Oleh karena itu sangat perlu penyesuaian harga itu, karena bisa mendorong apa, percepatan proyek.

Terus kemudian, saya sebenarnya ingin mengadukan keluhan teman-teman, Pak, tetapi ini sudah di bidang lain. Jadi tender di luar Jawa itu banyak, bahkan di Jawa juga ada, ketika di jalur yang ditender itu ada kontraktor yang memenuhi persyaratan, baik teknis maupun administrasi, alat punya, apa Namanya, material punya, segalanya punya, untuk pekerjaan itu, tapi tidak dimenangkan. Yang dimenangkan bahkan orang-orang yang *enggak* punya alat, yang pada suatu saat diberikan kepada orang daerah tersebut, dengan harga yang *mepet* tadi. *Nah*, filosofinya teman di daerah itu, daripada tidak bekerja, dia bekerja dengan mengajukan penawaran. *Sontoloyonya*, ketika dikerjakan, yang memberi pekerjaan itu lari kencang, jadi masalah, sering itu. Konon di luar daerah banyak seperti begitu, di luar daerah di Jawa saja seperti begitu, Pak. Tapi ini keluhan, Pak, ya, bukan satu apa namanya ya, bukan satu permintaan kepada Pak Dirjen Bina Marga. Karena yang *nender* sudah di Bina Konstruksi, *gitu*. *Sontoloyo*.

Kemudian untuk Bina Konstruksi, Pak, saya mendapat keluhan dari kontraktor, sekarang ini sertifikasi itu justru sulit, prosesnya lama, beda dengan LPJK saat mandiri. LPJK saat mandiri benar, itu prosesnya cepat. Tetapi sertifikasi atau LPJK yang sekarang ini di bawah, di bawah atau setara, saya tidak tahu, tapi LPJK itu independen. Tapi ketika *independent*, mestinya tidak harus di bawah salah satu dirjen, tapi saya belum mempelajari. Intinya, Pak, sertifikasi badan usaha itu mohon untuk dipercepat. Karena itu tadi keluhannya, itu jadi semakin sulit, pertanyaannya, syaratnya, itu diada-ada, seperti *enggak* pernah selesai.

Saya kira itu saja dari saya, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

*Wa'alaikumsalam*, Pak Soehartono. Benar juga ya, Pak, ya, sertifikasi berat *gitu*, administrasi syarat-syaratnya. Tetapi pada saat lelang, *enggak* ada syarat-syarat itu dipakai.

Selanjutnya Pak Irwan, silakan Pak.

**F – P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan yang saya hormati,  
serta rekan-rekan Anggota Komisi V yang saya banggakan,  
Yang saya hormati Dirjen Bina Marga, Dirjen Bina Konstruksi,  
Bapak Direktur, Bapak para Pejabat Kementerian PUPR yang hadir pada rapat sore ini,**

Sebelumnya saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Bina Marga khususnya pada Pak Dirjen dan jajaran, atas komitmen ya, Pak Dirjen dan jajaran untuk menuntaskan jalan nasional, jalan dan jembatan ya jalan nasional di Kaltim, di tengah yang sebenarnya dua tahun ini kemudian ada fokus juga terhadap perintah Pak Presiden untuk membangun IKN.

Tetapi saya lihat dan saya mengikuti ya, sejak 2020-2021, kemudian di 2022 ini, termasuk hari ini di bahan yang kita terima juga. Bahwa komitmen Direktorat Jenderal Bina Marga untuk kemudian menuntaskan permasalahan jalan nasional di Kaltim tetap focus, *gitu*. Jadi ini yang namanya berkeadilan, jangan *kayak* sebelumnya yang tadi, apa Namanya, pemaparan beberapa direktorat tadi. Bisa terlihat dari target untuk tahun depan, seingat saya 2020 itu kemandapan jalan di Kaltim itu 75%, Pak Dirjen. *Nah*, Pak Dirjen juga belum waktu itu. Kemudian perlahan kita bisa kemudian naikkan dan *insyaallah* tahun depan saya lihat target kemantapannya 86%. Dan tentu harapan saya di 2024 nanti, di akhir masa jabatan saya juga, bisa kemudian di atas 90%, sama dengan kemandapan jalan di provinsi lain terutama di Pulau Jawa. Jadi kami sangat mengapresiasi dan kami mohon terus fokus. Karena memang kalau *ngelihat* distribusi anggaran terhadap IKN ini, ya kadang-kadang menggugah hati juga pasti kawan-kawan yang lain, *gitu*. Termasuk kami di Kaltim juga mengalami apa namanya, kekhawatiran apakah kemudian beberapa prioritas-prioritas program itu kemudian terdampak.

Kemudian terima kasih juga untuk akses pelabuhan Kenyamukan di Sangata, kami sangat-sangat yakin kalau ini pelabuhan ini fungsional, dapat kemudian mengakselerasi pembangunan di Kaltim, juga membantu apa namanya, mengurangi beban jalan nasional kita, terutama terkait material logistik dan lain-lain.



Kemudian untuk Bina Konstruksi, Pak Dirjen, terima kasih, kemarin saya diundang bersama Pak Menteri walaupun akhirnya saya juga batal, saya minta maaf untuk belum bisa hadir di sana. Ada 1.535 orang yang dilatih tenaga kerja konstruksi. Harapannya, karena ini targetnya kan sampai 9.300 ya, Pak, untuk di IKN ini, agar ke depan jangan hanya diundang, Pak Dirjen, tetapi kami dilibatkan. Karena kami juga sebagai Anggota DPR RI Dapil Kaltim, juga berkomunikasi dengan para tenaga tukang bangunan, tenaga kerja konstruksi lainnya. Sehingga sebelum-sebelumnya juga kita dilibatkan dalam pengusulan ya, kita juga sebagai Anggota DPR RI dari sana, sangat memahami juga sebaran, ya. Kita juga bisa melakukan pengawasan, apakah tenaga konstruksi yang dilatih ini tidak kemudian hanya mengakomodasi satu kelompok, golongan, dan lain-lain. Sehingga harapannya terkait untuk rencana 2023, saya lihat ada rencana 2.500 orang untuk pelatihan di IKN untuk tenaga kerja konstruksi juga kita sangat minta dilibatkan. Minimal jelas berapa yang kita coba usulkan dari beberapa, dari 10 kabupaten/kota untuk pelatihan ini. Termasuk juga bukan hanya IKN, tetapi yang vokasi sama dukungannya juga kita bisa dilibatkan.

Itu saja, Pimpinan, yang ingin kami sampaikan. Pada prinsipnya kami sangat mengapresiasi kerja-kerja Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Selanjutnya Ibu Sri Rahayu dari Fraksi PDIP. Siap-siap Ibu Novita Wijayanti.

**F – PDIP (SRI RAHAYU):**

Terima kasih, Pimpinan.

Yang pertama saya hanya ingin menanyakan saja dari program yang Bapak dari Dirjen Bina Marga, pada halaman 52, Pak, itu saya hanya mohon penjelasan saja. Pada program penanganan infrastruktur konektivitas, poin 11,12 dan 13. Pantai Sine batas Kabupaten Blitar dan seterusnya, mohon saya dijelaskan apakah itu jalan yang sekarang sedang dibangun atau titik-titik baru. Halaman 52, Pak, iya Jawa Timur, Jawa Timur. Sudah Pak? *nggih* 11, 12, 13.

Demikian juga pada halaman 53, 21, nomor 21, saya minta penjelasan supaya untuk mendapat kepastian, saya, yang nomor 21, Pak, halaman 53, sebelahnya, iya.

Kemudian saya juga ingin menanyakan yang nomor 22 itu Jembatan Gudangan Pansela itu apakah yang sekarang sedang dibangun itu, yang nomor 22, Pak, tetap halaman 53. Karena ketika saya lihat di sana, jalannya sudah bagus tapi masih terputus, sehingga programnya itu sampai kapan, sehingga bisa selesai pada titik tertentu.

Dan saya sudah pernah usul, Pak, untuk tahun 2023 ini kaitannya dengan preservasi jalan, yaitu yang di Kabupaten Blitar yang kemarin saya sampaikan juga pada rapat yaitu jalan jalan apa Kesamben itu, Kecamatan Kesamben, yang jalannya sempit. Ya mungkin juga termasuk pembangunan jembatan yang memang harus komunikasi dengan Bupati itu, kira-kira langkah-langkah dan perkembangannya seperti apa? Supaya, karena betul betul saya merasa miris, Pak, seringkali kecelakaan itu, jadi saya seringkali saya sampaikan, karena memang jalannya sempit sekali dan miring *gitu* jalannya, yang sekarang itu miring, sehingga ini perlu mendapatkan perhatian betul. Dan sekarang truk-truk tebu itu dari Malang dibawa ke situ, yang dari lain dibawa ke Malang, jadi ada pabrik gula di sana. Sehingga lalu lintas untuk barang apa, kendaraan-kendaraan besar itu sangat luar biasa, sehingga perlu perhatian. Bahaya sekali itu, kencang sedikit saja pasti akan *nggoling*.

Kemudian yang terakhir, Pak, di jalan, di Kabupaten Malang, Pak, itu ada jalan nasional yang kemarin ada tembus jalan lingkar ya, lingkar dari dari Kepanjen, *eh* bukan Kepanjen, sebelum Kepanjen, Pakis Haji, kemudian ada potong begitu, itu bahaya sekali jalannya, Pak, ininya, apa, orang *nggak* kelihatan kalau jalan itu apa namanya *jeglong-jeglong gitu* ya. Itu mohon menjadi perhatian, karena sangat berbahaya dan itu bisa menimbulkan kecelakaan, karena memang seakan-akan jalannya mulus tapi sebenarnya tidak demikian. Itu hanya hanya beberapa kilo ya, tidak Panjang, tapi perlu mendapatkan perhatian.

Kemudian yang terakhir, Pak, di situ kan ada program, di setiap ini kan jembatan gantung, jembatan gantung, itu. Apakah jembatan gantung yang dimaksud itu di titik itu sudah ditentukan berapa-berapa kuantitasnya, termasuk aspirasi dari kawan-kawan, atau itu ada titik-titik yang memang ditentukan oleh Dirjen Bina Marga?

Dan sekaligus saya ingin menyampaikan, ketika ada wilayah-wilayah manapun, wilayah-wilayah manapun yang seringkali viral, ada anak-anak ataupun orang yang menyebrang ke sungai yang dengan menggunakan tali, tolong itu segera diambil Langkah, Pak, untuk segera ditindaklanjuti karena itu sangat berbahaya sekali. Rasanya juga kurang elok kalau di tempat kita yang jalannya sudah banyak tolnya, kemudian masih ada penyebrangan seperti itu, apakah menggunakan jembatan gantung atau menggunakan apa, silakan. Tolong itu segera diapresiasi, bukan apresiasi ya, segera ditangkap aspirasinya, kemudian ditindaklanjuti dan masih ada waktu untuk tahun 2023.

Karena kalau kita melihat itu, entah itu, entah itu apa, video lama atau baru, tolong itu kalau memang video lama disampaikan, kalau memang baru segera ditindaklanjuti, karena itu anak-anak kita juga yang sampai-sampai

harus naik, itu rasanya juga miris begitu ya terutama di daerah-daerah Kalimantan mungkin, Sumatera, dan seterusnya.

Saya kira itu saja dari saya, terima kasih.

**F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Terima kasih Bu, silakan Bu Novi.

**F – P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan, Anggota, Pak Dirjen, semua jajaran yang saya hormati,**

Pak Dirjen, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena beberapa program sudah realisasi. Beberapa program pastinya tidak, belum semuanya ya, Pak Dirjen. Jadi permintaannya, usulan-usulan yang sudah masuk bisa realisasi semuanya, *gitu*. Contohnya di dapil saya ada beberapa usulan yang sudah bertahun-tahun belum dan ini kebetulan Undang-Undang No. 2 sudah berjalan, tapi mungkin masih ada menunggu juklak ya, Pak Dirjen. Kita menunggu untuk apa namanya, Undang-Undang No. 2 itu bisa dilaksanakan, sehingga kita bisa membantu apa, jalur jalan yang di kabupaten-kabupaten dan di kecamatan-kecamatan. Contohnya di kabupaten saya ada Kecamatan Wanareja, Pak, yang dari jaman dirjennya Pak Aris itu sudah ke sana, tapi usulannya belum selesai sampai tahun ini, berarti sudah berapa tahun itu.

Kemudian, Pak Hedy, kemarin kita kunjungan ke jalan tol *tuh*, jalan tol. Tapi kita datang ke sana ditemani oleh Pak Yongki *gitu*, belum ditemani oleh Pak Danang. Walaupun kita berteman, tapi setiap kunjungan *nih* Pak Danang belum pernah ikut ini. Jadi ke mana itu Cibitung, apa ya, kemarin itu, iya ini Pak Yongki *nih*, nanti saya langsung dijabri sama Pak Danang nanti, pasti.

Jadi beberapa jalan tol ini ada beberapa permasalahan *gitu*, memang saya sampaikan di sini. Contohnya *kayak* yang kemarin itu di mana tadi *tuh*, Cinere ya Cinere. Kemudian di Demak juga, itu ada permasalahan jalan yang sampai sekarang belum *clear*, *gitu*. Ada jalan apa *tuh* jalan hilang ya, tanah musnah, kemudian ada jalan yang belum dibayar, apa namanya, belum dibayar pergantian ganti untungnya, *gitu*.

Maksud saya *gini*, Pak, banyak sekali permasalahan yang terjadi di jalan tol berkaitan dengan pengadilan, kemudian berkaitan dengan ATR. Maksudnya bahwa apakah Bina Marga sudah juga membantu proses ini supaya cepat selesai permasalahannya? Karena kemarin kita sempat tercetus, ada solusi bagaimana kita bisa memfasilitasi pertemuan-pertemuan dengan beberapa kementerian, supaya permasalahan ini bisa segera selesai, *gitu*. Dipetakan

semua permasalahan yang ada di Indonesia dan kemudian dicarikan solusi bersama.

Kemudian mengenai itu berikutnya, Pak, ya pasti itu PR, Pak, ya, karena itu pasti banyak sekali permasalahan di jalan tol mengenai tanah, tentang tanah, kemudian pergantiannya belum selesai dan sengketa, tumpang-tindih, dan lain sebagainya. Maksudnya adalah bagaimana segera dicarikan solusinya Bersama, supaya tidak berlarut-larut *gitu*.

Kemudian mengenai apa, program ini, Pak, ODOL, *nih*, Pak. ODOL ini kan banyak merusak jalan *nih*. Kita anggaran terus untuk preservasi, untuk segala macam. Kemudian dari Bina Marga dengan Perhubungan, apakah sudah, selalu berkoordinasi bagaimana solusinya, dan ada teknologi yang WIM itu, yang *weigh in motion*, apakah sudah yang sudah diberlakukan dari tanggal 1 Januari itu sudah berjalan terus *gitu*, sudah dipasang di manakah itu, apa namanya, WIM. Katanya sekarang, saya dapat informasi, sekarang tidak di Perhubungan Darat, tetapi di, ketentuannya di Bina Marga. Apakah betul *gitu*? Karena ini menurut saya penting, kalau ini dibiarkan, pastinya sangat merugikan anggaran kita. Semuanya selalu, apa namanya, untuk pembiayaan perbaikan jalan-jalan kita.

Kemudian untuk anggaran-anggaran program yang sudah lelang, diharapkan anggarannya jangan sampai kosong, Pak. Karena ada beberapa kemarin informasi, contohnya jembatan gantung sudah lelang, tetapi anggarannya belum ada *gitu*, sudah beberapa bulan lelang tetapi belum bisa dilaksanakan karena anggarannya belum ada. Makanya itu saya minta Pak Hedy untuk bisa segera diselesaikan.

Kemudian permasalahan di jalan Kretek yang Brebes, Pak, itu apa sudah ada, apa namanya, antisipasi *gitu*, yang kecelakaan sudah memakan korban jiwa 39 itu, Pak, yang dulu kita ada usul, KNKT juga sudah mengeluarkan rekomendasi, apakah di tahun 2023 ini ada program untuk di jalan Kretek Brebes itu?

Kemudian di dapil saya, tadi saya beberapa, terima kasih. Tapi yang Wanareja ini belum, Pak. Kemudian jembatan gantung, kalau satu tahun cuma dapat satu *gitu* atau mungkin ada yang bisa dapat dua *gitu* ya, tapi rata-rata satu, ini kelihatannya kurang, Pak Hedi, karena usulan di daerah itu banyak sekali, banyak daerah-daerah yang membutuhkan jembatan gantung dibangun. Jadi harapannya tidak hanya satu yang bisa turun.

Itu saja lah Pimpinan, nanti. Nanti kalau ada, saya komunikasi WA saja, terima kasih. Karena ini dirjennya dan jajaran *sih* baik semuanya sampai bawah, *cuman* bisa dimaksimalkan lagi.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Saya lagi flu *nih*, jadi, terima kasih.

**F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

*Makasih*, Bu. Bapak sudah punya nomor WA-nya, Bu? Pak?

**F – P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):**

Saya, istrinya Pak Hedy juga punya nomornya, jadi aman.

**F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Baik, sebelumnya sebelum ke anggota. Kami akan serahkan ke Pak Robert Rouw dulu, karena beliau ada agenda fraksi. Mohon berkenan teman-teman anggota, siap-siap Pak Irmawan.

**F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Iya, terima kasih, Pimpinan.

Mohon maaf, teman-teman karena ada kegiatan nanti jam setengah 6, saya harus jalan.

**Pimpinan, terima kasih atas waktunya,  
Saudara Dirjen Bina Marga dan Bina Konstruksi yang kami hormati dari seluruh jajaran,**

Pertama-tama, saya ke Dirjen Bina Marga, saya berikan apresiasi kepada saudara Dirjen dan seluruh jajaran, terutama balai di daerah dapil kami. Karena menurut saya ini yang harus dilakukan, bahwa kita ini adalah mitra. Sebelum kami rapat pada saat ini, itu mitra kami dari daerah, balai itu, sudah telfon kami menyampaikan bahwa apa saja yang kami usulkan selama ini sudah tertampung dan akan dilakukan seperti apa. Ini yang perlu, komunikasi ini yang menurut saya perlu dilakukan. Ini yang belum dilakukan oleh para mitra yang lain.

Jadi itu, maka saya ingin menyampaikan terima kasih, karena program ini, usulan ini, kami sudah usulkan untuk jalan di 2022, tetapi tidak bisa, karena keterbatasan waktu dan anggaran, maka sudah ada di dalam nomenklatur untuk 2023, yaitu perbaikan jalan menuju pelabuhan petikemas Depapre yang betul-betul rusak parah. Terima kasih, Pak Dirjen, ya, ini sudah masuk. Harapan kami bisa segera nanti diadakan lelang dini untuk bisa membuat suatu penyelesaian agar pelabuhan itu bisa dioptimalkan keberadaannya.

Yang berikut yaitu apa yang sudah Pak Menteri sampaikan, yaitu hibah jembatan, rangka jembatan dua buah itu sudah, satu sudah dalam proses pemasangan, tinggal yang satu lagi belum. Dan yang berikut tentang

memasukkan pembangunan jembatan Biang di Merauke. *Nah*, itu juga saya lihat ada masuk di *multi years* ya, dalam kegiatan periode 2023. Ini, hal-hal ini ya kami ingin seperti ini, bahwa kami apa yang kami sampaikan itu betul-betul dapat terwujud di dalam kementerian yang kami menjadi mitra.

Yang berikut, saya kira kemarin dengan Pak Menteri juga sudah saya sampaikan, saudara Dirjen. Yaitu pentingnya pembangunan pembukaan ruas jalan yang menghubungkan dari Dekai ke jembatan Pepera, pelabuhan Pepera. *Nah*, itu dari Dekai sampai ke pelabuhan jembatan A itu sudah dibuat oleh Kabupaten Yahukimo, karena dia punya kepentingan untuk pelabuhan itu harus bisa diakses. Sedangkan pelabuhan itu berada di Kabupaten Asmat, jadi Asmat tidak punya di pelabuhan itu sebenarnya. Maka saya minta untuk, dari kementerian bisa masuk ke sana, karena manfaatnya untuk Asmat sangat tidak ada. Tinggal sekarang akses jalan dan jembatan A itu dari Kekei menuju ke Pepera itu tinggal 25 kilo saja untuk pembukaan jalan. Itu sudah bisa akses, itu sudah bisa dipakai oleh masyarakat. Jadi ini menjadi aspirasi kami, yang saya inginkan bahwa ini menjadi prioritas juga untuk ke depan di Papua nanti.

Yang berikut, saya juga ingin bahwa setelah itu nanti, bahwa akses jalan Yahukimo-Jayawijaya itu bisa terealisasi. Ya memang sekarang kalau kita bicara pembangunan di pegunungan, selalu memang ada portal yang menghalang kita, yaitu tentang keamanan. Kemarin saya sudah coba bertanya kepada bupati dari Yahukimo, dari Wamena, ini *gimana*, ini masuk di daerah merah *enggak?* oh kalau ini *enggak?* ini bisa dilakukan *gitu*, ini bisa karena ini tidak masuk di daerah, ya kan. Kemarin penembakan di sana, itu sebenarnya bukan masalah KKB dan sebagainya, itu masalah penambangan liar, konflik di penambangan liar, jadi penembakan di Yahukimo kemarin. Saya sudah coba minta diskusi dengan teman-teman bupati dan jajaran. Mereka sudah sampaikan bahwa itu bukan kasus KKB, tapi itu adalah kasus penambangan liar, maka kita harus bisa pisahkan itu.

Yang berikut, tadi Bu Novi *ngomong* soal jembatan gantung, saya juga kemarin sudah dilaporkan. Memang saya juga punya jembatan gantung, kemarin dari kepala balai yang satu sampai sudah pensiun, ganti kepala balai yang baru. Kepala balai kemarin sudah telfon saya, "Pak, karena waktunya *mepet*, jadi kami nanti luncurkan di 2023". Harapan saya, nanti dia tidak masuk di jatah 2023, Pak, nanti jangan dikasih di sana, jatah 2023 harus keluar juga *gitu* ya. Jadi biar sekaligus saya, ya kalau Bu Novi tadi bilang bahwa ada yang sudah lelang *enggak* ada duitnya, ya saya curiga ke sana nanti. Tapi saya berpositif, pikir saja bahwa, ah, ini karena kepala balai yang lama terlambat, maka beban kepada kepala balai yang baru, dia tidak bisa ambil satu ini karena waktunya memang *mepet*.

Yang berikut, saya kira kalau kita lihat anggaran preservasi Tahun Anggaran 2023 ini mencapai 23 koma eh 25,44 triliun atau mencapai 3 kali lipat dari anggaran pembangunan jalan, pembangunan jalan itu cuma 8,53 triliun. Saya kira situasi ini kan tidak terlalu, menurut saya tidak wajar lah, ya kan. Karena berarti terjadi kerusakan jalan yang begitu banyak, ya kan. *Nah*, ini kan apa sebabnya, ya kan, kita bisa, apa yang selalu kita *ngomong* di sini,

kecurigaan kita karena kualitas jalan itu tidak sesuai, ya kan. Karena kontrak-kontrak yang selama ini berjalan, kami sudah protes. *Nah*, ini hasilnya, ini hasilnya, dampaknya itu. Bahwa perbaikan begitu besar ya kan, tapi pembangunan jalan menjadi turun jauh. Ya ini, ini, ini ,yang menjadi catatan penting untuk kita ke depan. Ya saya kira itu ke Bina Marga, sekali lagi, terima kasih, karena komunikasi kita cukup baik.

Saya masuk ke Bina Konstruksi, kalau kita, saya ke anggaran Bina Konstruksi. Bina Konstruksi, kalau kita lihat 2022, itu pagu total pagu anggarannya, pertama, semula itu 600 miliar. Setelah, miliar menjadi 649,363 miliar, berarti ada penambahan, ada penambahan. Kalau kita lihat lagi di 2023 ini sama, usulan awal indikatif itu sebesar 533,8 miliar, ya kan. Dapatnya 567,6 miliar.

Jadi kalau Bina Konstruksinya mintanya satu, dikasihnya dua, ada peningkatan ya, iya kan betul ya, Pak, ya? perbandingan dari 2022 sama juga ya kan, 600 menjadi 600 sekian, ada penambahan. Di 2023 juga begitu, 533 naik menjadi 567 ya. Khusus untuk IKN saja 33 miliar, ya kan. Kalau kita bicara Bina Konstruksi kan bicara kertas semua itu kan, kontrak-kontrak, ya kan. Ya menurut saya ya tidak perlu harus penambahan di sini, ya kan. Kalaupun diminta sekian ya harusnya dikurangin, ini dapat lebih, ada apa *gitu*, ya kan. Kalau menurut saya tidak, menurut saya tidak perlu ada penambahan itu ya, itu untuk anggaran.

Yang berikut, tentang pengawasan saya terhadap kinerja dan hasil kerja. Yang saya dapatkan di lapangan hasil kerja, Pak Dirjen Bina Konstruksi, kepada, saya kembali dulu ke Pak Dirjen Bina Marga. Saya sangat apresiasi kepada teman-teman balai di daerah yang sudah melakukan PK, putusan kontrak, terhadap apa proyek yang saya sampaikan terus di sini. Tapi baru satu, Pak, masih ada dua lagi. Saya mohon itu segera dilakukan ya, karena kemarin itu kan ada 4-5 kontrak. Satu, Teluk Tabuk Keri itu di SDA, itu kontrak ulang, lagi pemutusan lagi, kontrak ulang, karena yang menang mengundurkan diri. Di tempat Bina Marga itu ada preservasi jalan, ada dua ya, dan jembatan dua. Jembatan dua ini satu sudah mau selesai, yang satu belum, ada apa-apa dan itu sudah dilakukan pemutusan hubungan kerja ya, jembatan Jorong, tinggal jalan, saya minta ini segera.

Yang harus duluan memang harus jalan, jangan nanti apa yang disampaikan Pak Menteri kemarin, Pak Menteri pasti dapat masukan juga kurang baik, menurut saya. Karena beliau sampaikan, oh iya ini ada keterlambatan karena ada kenaikan minyak dan sebagainya, kita tahu itu. Menurut saya kalau ini tidak, karena ini kontrak sudah hampir bulan Januari apa Februari itu sudah jalan kontraknya. Sekian bulan belum ada satu pun progres pengaspalan 10 meter kah atau 20 meter kah, belum sama sekali, Pak Dirjen. Jadi ini sudah tidak boleh lagi ya kan, katakanlah sudah SK 1, 2, atau SP 1, 2,. *Enggak* ada lagi ini, karena progres kerjanya mana *gitu*, ya kan. Kalau ada di situ, *quarry*-nya mana, AMP-nya mana *enggak* ada sama sekali, terus itu harus ditunggu lagi. Menurut saya ini sudah segera harus diputuskontrakkan, supaya jangan nanti jalan ini terbengkalai lagi. Besok nanti

yang harusnya selesai 2022, mundur lagi kita ke 2023, dengan anggaran yang sudah, ya itu pasti ada kerugian negara di situ, ya kan.

Ini yang ingin saya sampaikan kepada Dirjen Bina Konstruksi untuk menjadi pintu masuk, supaya ada diskresi khusus di tempat kami. Jangan lagi verifikasi, ya kontrak itu cuma kertas di dalam itu, verifikasi faktual yang harus dilihat dan ini pintu masuk banyak sekali yang sudah harus bisa dilakukan, ya. Saya diskusi dengan Kepala Balai BP2JK, beliau sendiri mengakui itu, sampai pun tidak sanggup, minta supaya kalau bisa dia dipecat, "Digantilah saya. Karena saya pun tiap hari dimaki-maki ini sama teman-teman di sini, pengusaha Papua khususnya". Tapi saya tidak bisa buat apa-apa, karena memang ada aturan-aturan yang seperti ini. Maka ini harus intervensi dari atas, memberikan diskresi khusus, kita lawan ini aturan ini, ya kan. Banyak pintunya yang sekarang sudah ada, bukti-bukti ada, bahwa ini pemutusan hubungan kerja, kontrak sekian habis semua balik, ya kan, tidak bisa dilakukan. Karena tidak ada yang namanya verifikasi faktual, ya kan, cuma lihat dia dalam laporan yang pakai kertas semuanya, maka ini menjadi semua rusak, ya, semua elektronik, tidak ada lagi ya, kertas *enggak*, ya.

Jadi saya mohon. Ini pintu masuknya sangat banyak yang bisa dipakai, ya. Kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Irjen juga, saya minta sekarang Pak Irjen, dan beliau sudah sampaikan, "Akan turunkan tim segera", ya kan. Karena ini sudah tidak bisa lagi kita biarkan seperti itu, Pak, sudah harus segera kita lakukan perbaikan, ya kan, segera lakukan perbaikan.

Jadi itu saja, Pimpinan, saya mohon, sekaligus mohon diri, Pimpinan, karena saya harus ada. Ketua sudah balik, saya serahkan ke Pak Ketua, lanjut, terima kasih. Saya berikan ke Pimpinan.

**KETUA RAPAT/F- PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:**

Baik, ada yang mau diserahkan, Pak Roberth?

**F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Ada, satu.

**KETUA RAPAT:**

Oh ada iya sekalian silakan, Pak, iya silakan, silakan, Pak, silakan. Ketua tahu lah.

Baik, terima kasih Pak Roberth, selamat melaksanakan tugas selanjutnya. Iya masih ada, Pak, ya? Iya, silakan. Baik, kalau masih ada, boleh lagi, Pak.

Wah kalau kalimat terakhir tuh *ndak* bener, Pak, itu hahaha, kita kasih seluas-luasnya buat Pak Roberth. Mana berani kita. Baik, terima kasih, Pak



Roberth, ya, canda Pak Roberth, ya. Iya baik, saya kalau *enggak* ada Pak Roberth, sepi ruangan ini.

Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Irmawan, Pak Irmawan, ya. Bersiap-siap Pak Suryadi Jaya Purnama.

**F – PKB (H. IRMAWAN, S.Sos., M.M.):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang kami hormati Pak Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi,**

Saya langsung saja *nih* Pak Dirjen, pertama ke Dirjen Bina Konstruksi. Terkait dengan pembangunan jalan Gempang Pameuh, Pak, yang mana pihak BP2JK Pokjanya memenangkan PT. Pramen Prima Mandiri sebagai pemenangnya. Dan sampai hari ini di media masih perang media ini, Pak, masih banyak persoalan kontrak ini, pemenang ini, masih dipersoalkan, karena diyakini banyak syarat-syarat yang tidak terpenuhi namun *toh* dia tetap dimenangkan. Sehingga jangan nanti gara-gara persoalan tender ini yang tidak benar, kemudian berdampak terhadap proses pelaksanaan fisiknya. Jadi saya berharap kepada Pak Dirjen, Pak Dirjen Bina Konstruksi terutama, agar dapat segera mengkelarkan persoalan ini, sehingga di lapangan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.

Kemudian selanjutnya ke Dirjen Bina Marga. Ini saya mau tanya saja *nih* Pak, karena kebetulan ada jalan nasional di Aceh itu yang menghubungkan Banda Aceh dengan Aceh Barat. Banda Aceh dengan Aceh Barat, yaitu ada Gunung Geurutee namanya, yang gunung ini penuh dengan bebatuan, tidak memungkinkan ruas jalan itu untuk kita lebarkan. Dan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kalau saya tidak salah, dari pihak Kementerian PUPR sudah mengalokasikan anggaran untuk perencanaannya untuk membuat terowongan. Tapi sampai hari ini, terowongan ini tidak ada kedengaran lagi, Pak. Jadi mohon klarifikasinya, apakah ini memang masih mungkin masih untuk bisa dilaksanakan agar ruas jalan Banda Aceh-Melauboh ini bisa lancar dilalui kendaraan, itu satu.

Kemudian terkait dengan ruas jalan bagian tengah, Pak, yang batas Aceh Tengah kemudian Gayo Luwes dan Aceh Tenggara. Ini adalah 2-3 kabupaten-kabupaten yang pegunungan, tentu saja daerah pegunungan ini kondisi alamnya sering terjadi longsor, Pak. Saya melihat dari pihak Kementerian PUPR terutama balai jalan di Aceh, Pak, tidak terlalu fokus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan longsor yang ada di daerah ini. Karena ada beberapa titik yang rutin longsor setiap saat, Pak, begitu sedikit saja hujan, kemudian longsor. Penanganan yang dilakukan selama ini hanya begitu longsor dibuang materialnya, tidak ada upaya permanen untuk menyelesaikan agar longsor ini tidak berkelanjutan, Pak. Jadi oleh karena itu, saya berharap dalam kesempatan ini kepada pihak Bina Marga, ke depan agar bisa fokus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan longsor yang ada di ruas jalan bagian tengah ini, Pak.

Kemudian selanjutnya, beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi dulu, kita juga telah pernah menganggarkan ruas jalan Kumala Janto, Pak. Ruas jalan Kumala Janto sudah pernah dianggarkan pada tahun itu, kemudian kalau saya tidak salah, kena *refocusing* anggarannya, sehingga tidak jadi. Karena jalan ini memang sangat dibutuhkan, kita berharap ini agar bisa kembali untuk dilanjutkan, Pak. Tapi saya melihat di paparan tadi, belum termasuk ada ruas jalan Kumala Janto untuk dilaksanakan. Dan disamping itu, ada beberapa ruas jalan juga yang perlu pelebaran, perlu pembangunan jalan dua jalur. Mungkin secara tertulis nanti akan saya sampaikan catatan kepada Bapak.

Mungkin ini saja Ketua, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

#### **KETUA RAPAT:**

*Makasih*, Pak Irmawan, masih ada yang mau diserahkan Pak? Baik, silakan, silakan Pak. *Makasih*, Pak Irmawan, tolong habis nyerahkan jangan pulang, Pak ya, tunggu kita, Pak.

Baik, Pak Suryadi, silakan.

#### **F – PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):**

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

#### **Pak Dirjen beserta seluruh jajaran,**

Saya langsung saja, pertama ini terkait dengan kemitraan kita dengan Pak Menteri, sudah sangat bagus. Namun saya memberikan catatan, ini ketika ada pergantian pejabat di daerah, agar lebih cepat berkoordinasi dengan kami, Anggota Komisi V. Karena jangan sampai kita seperti peribahasa, datang tampak muka, pulang tampak punggung, *gitu* ya. Jadi ini karena sekali lagi koordinasi kemitraan yang baik dari tingkat pusat sampai daerah, ini akan menjadi faktor utama suksesnya program-program kita. Jadi Pak Dirjen Bina Konstruksi, Pak Dirjen Bina Marga, ini agar, kebetulan dua-duanya ini baru di daerah kami di NTB. Ya jadi ini penting, supaya koordinasinya bisa lebih bagus.

Saya mulai dari Dirjen Bina Marga, dalam laporan ini dicantumkan pembangunan untuk IKN 2,11 triliun dan angka ini memang baru muncul pada RDP kali ini. Saya membuka catatan, pada rapat kerja kita terakhir, 29 Juni 2022, anggaran ini belum pernah dimunculkan. Sehingga ke depan, kita berharap bahwa seluruh program-program itu agar dipaparkan, karena jangan sampai ada program yang kemudian masuknya lewat mana, *gitu*. Untuk 2022 kami memaklumi, karena masih berlaku Undang-Undang. No. 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Covid. Tetapi Undang-Undang itu akan berakhir tahun ini, sehingga pembahasan 2023 tidak bisa seperti itu lagi, Pak.

Artinya pembahasannya secara normal di DPR dan payung hukumnya ini harus jelas legalitasnya. Karena dalam pengelolaan negara, legalitas ini kadang jauh lebih penting daripada substansinya, ya. Karena itu bisa jadi masalah, oleh karena itu ke depan agar ini tidak terulang lagi.

Nah untuk 2023, saya mencatat ada 17% anggaran dari Dirjen Bina Marga untuk IKN yang sebesar 8,73 triliun. Maksud saya, dalam, saya ikut di Pansus RUU IKN, salah satu dasar pemikiran pemerintah adalah merubah dari Jawasentris menjadi Indonesiasentris, tapi ternyata sekarang menjadi salah kaprah menjadi IKN sentris. Artinya anggaran-anggaran daerah itu terkumpul, jatah-jatah daerah berkurang kemudian difokuskan untuk IKN. Misalnya tadi di Dirjen Cipta Karya itu 43% hanya untuk satu titik, bahkan bukan Kalimantan secara keseluruhan, bukan Kalimantan Timur juga, tapi di IKN. Sehingga ini jangan sampai merubah dari Jawasentris. Walaupun itu sebenarnya beralasan, karena memang mayoritas penduduk Indonesia di Jawa, tetapi menjadi IKN sentris ini perlu menjadi masalah.

Oleh karena itu, harus ada semacam kompensasi bagi daerah-daerah, terutama daerah-daerah di luar Jawa selain IKN, seperti di NTB, infrastruktur yang masih sangat minim, perlu menjadi perhatian khusus. *Nah*, secara khusus ini kami juga akan mengajukan beberapa program di Dirjen Bina Marga. Selain yang sudah ada direncanakan, tapi ada beberapa usulan yang sebetulnya lebih prioritas, kami lihat dalam tabel ini belum masuk, Pak. Nanti bisa diakomodir dalam APBN ini ataupun melalui Inpres penanganan jalan daerah. Jadi secara khusus nanti akan kami sampaikan, karena banyak sekali yang belum diakomodir. Ini supaya tidak ada kecemburuan, satu titik 8,73 triliun, tapi daerah-daerah lain banyak yang kemudian tidak diakomodir.

Berikutnya, Pak Dirjen, masih di Bina Marga, ini terkait dengan Padat Karya, ya. *Alhamdulillah* untuk jembatan gantung kami sudah berkoordinasi sangat baik dengan Pak Kepala Balai, saya apresiasi walaupun beliau baru di NTB tapi cukup gesit berkoordinasi, mudah-mudahan beliau juga masih mengikuti. Tetapi Program Padat Karya sampai saat ini tidak ada koordinasi Pak, ya termasuk juga dengan kepala balai sebelumnya. Ya oleh karena itu saya termasuk yang mempertanyakan kemarin pada rapat kita bulan Juni ada 4,7 triliun anggaran Padat Karya di Bina Marga. Ini yang sebetulnya tidak detail kita bahas, hanya gelondongan, kemudian ini bervariasi di setiap daerah. Oleh karena itu, saya secara khusus, nanti Pak Dirjen agar diingatkan di Kepala Balai, untuk Padat Karya ini bisa kita berkoordinasi, walaupun yang lain-lain *alhamdulillah* sudah cukup bagus ya.

Berikutnya untuk Dirjen Bina Konstruksi, Pak, saya mulai dari Perpres No. 62 Tahun 2022. Yang salah satunya misalnya menyinggung kalau ada pengusaha nonkecil di luar Kalimantan, maka dia harus menggandeng pengusaha kecil di Kalimantan, baik dalam bentuk JO, kemudian subkon, dan lain sebagainya. Spirit ini bagus. Oleh karena itu ini harus konsisten dilaksanakan di daerah-daerah, tidak saja untuk di IKN, tetapi juga di semua

daerah, agar tidak terjadi kecemburuan. Kecuali kalau pengusaha daerah tidak mampu, kenyataannya mampu, ya.

Oleh karena itu sekali lagi ini supaya tidak berulang catatan kita, Pak Dirjen. Ini perlu menjadi perhatian khusus ya, karena sebetulnya kami sudah punya data ini cukup detail, karena menyangkut nama dan perusahaan, barangkali nanti dalam rapat tertutup kami akan sampaikan. Artinya nanti jangan ditanggapi secara normatif, kalau normatifnya kami juga sudah paham. Jadi masalah ini juga bukan hal baru bagi kami Anggota Komisi V, ya kita sudah baca undang-undangnya, kita baca Perpresnya dan semua regulasi yang terkait dengan ini. Yang kita bicarakan ini adalah implementasinya. Sehingga kadang-kadang kita keluar dari hal-hal yang bersifat normatif. Saya paham kalau di dalam rapat terbuka, mungkin jawabannya normatif, tapi menurut saya Pak Dirjen harus memahami apa yang kami maksudkan, ya, supaya ini tidak menjadi masalah.

Termasuk misalnya program-program atau proyek-proyek yang nilainya 100 miliar ke atas, ini kan diprioritaskan BUMN, oke kita memaklumi. Tetapi harus ada misalnya seperti tadi, BUMN ini harus menggandeng mitra lokal dan mitra lokal pun juga harus secara merata, jangan sampai mitra lokal yang itu-itu, kami punya datanya, Pak, kita melihat polanya. Dan ini tidak mungkin secara alamiah, ini pasti ada aktornya yang mengatur seperti ini. Dan kami tahu juga, misalnya ketika di satu perusahaan yang memang ingin diprioritaskan, maka pemeriksaannya tidak detail. Tapi ketika perusahaan itu tidak diinginkan, oh akan dicari-cari sampai ketemu, ya. Bahkan misalnya ada perusahaan yang dalam satu tahapan sudah gugur, itu bisa hidup lagi, Pak. Karena ini menyangkut nama dan perusahaan nanti akan kami sampaikan dalam rapat tertutup.

Tapi setidaknya, Pak Dirjen Bina Konstruksi, ini menjadi perhatian dan konsistensi itu bisa dilaksanakan. Ya karena kami punya tanggung jawab di dapil masing-masing, program kita sebagai mitra ini bisa berjalan dengan baik. Ya kami bukan cuma sebagai pejabat negara, tapi juga kita apa, politisi yang punya hubungan dengan berbagai lapisan masyarakat. Kalau koordinasinya bagus, kami akan amankan kegiatan kita disana. Tapi kalau koordinasinya tidak baik, ya tentu kami tidak tau bagaimana cara mengamankan kegiatan kita di daerah.

*Nah*, oleh karena itu ini, Pak Ketua, agar Pak Dirjen secara khusus juga memberikan pengarahan kepada rekan-rekan di balai. Bahkan mungkin pada batas tertentu saya kira tidak salah kalau nanti kami akan merekomendasikan yang bersifat katakanlah menghendaki orang atau tidak menghendaki orang dalam konteks ini, ya, karena ini tanggung jawab kita sebagai perwakilan di daerah.

Barangkali demikian detailnya, Pak Ketua, saya berharap nanti ada rapat tertutup, karena menyangkut nama dan perusahaan, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

Baik, *makasih*, Pak Suryadi. Panjang lebar ya, mungkin kalau bisa kita persingkat ke inti-intinya saja ya ini sudah dekat maghrib.

Pak Ishak Mekki, bersiap-siap Ibu Sadarestuwati.

**F – P. DEMOKRAT (Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M.):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Saya langsung saja ke Pak Dirjen Bina Marga. Saya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Roberth Rouw tadi. Memang kalau dari pelaksanaan jalan ini, memang tanggung jawab teknis secara moralnya *tuh* ada di Dirjen Bina Marga, Dirjen Bina Marga. *Nah*, kalau di hulunya tidak beres, itu akan berdampak ke hilir. *Nah*, seperti pelelangan, sekarang ini pelelangan itu tidak ada pengecekan fisik ke lapangan, oleh BPJK maupun dari balai, karena aturannya di LPJK bilanganya. Jadi tidak ada. Banyak alat-alat yang sudah tua yang sudah uzur, *enggak* bisa masuk di dalam situ, tapi dapat pekerjaan, *nah*, ini. Jadi ini hulunya ini harus diperbaiki.

Dan juga pengawasan, pengawasan. Seperti pengawasan jalan tol itu berapa kali sudah dikatakan, *nah* itu, itu sangat berpengaruh besar. Sebagai apapun perencanaan, kalau pengawasannya tidak beres, akan juga melenceng, berdampak yang tidak baik. Seperti jalan tol Palembang Kayuagung-Pematang Panggang, itu sudah direhab luar biasa. Karena saya sering lewat sana, sudah direhab, habis peresmian, belum setahun, direhab. *Nah*, sekarang belum dua tahun, sudah direhab total lagi. *Nah*, ini apa dampak dari pengawasannya kurang. Sedangkan pengawasannya itu dulu dari BUMN itu sendiri, yang *ngerjakan* BUMN, yang mengawasi BUMN dari dana BUMN, anak perusahaan, nah ini yang berdampak. Akibatnya semestinya sistem perencanaan itu sebagai vakum, karena itu tidak tanah rawa dan sebagainya, ada yang tidak divakum, akibat pengawasan lalai tadi.

*Nah*, sekarang Jembatan Sungai Sodong *operate*-nya sudah menurun, *nah*, yang sudah dikerjakan lagi sekarang. *Nah*, kapan sampai selesainya jalan ini sudah bertahun-tahun, dananya super besar, tapi kerusakannya luar biasa, *nah*, ini tolong diperhatikan. Karena Bina Marga, Dirjen Bina Marga ini bertanggung jawab total terhadap hasil dari pekerjaan ini.

Kedua, saya mengusulkan, Pak Dirjen, ya mungkin sedikit saya fokus saja sedikit. Ada pesantren, jalannya sudah rusak, mungkin ada 1 kilometer ke dari jalan besar ke lokasi pondok itu, minta dibantu dana sisa tender, kalau bisa dilakukan 2022 ini atau di 2023. Karena kemarin juga saya dapat bantuan, membantu universitas, sisa tender dari balai itu bisa juga dibantu. Nah ini untuk pesantren untuk tahun ini harapan saya. Itu saja mungkin dari saya, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

*Makasih, Pak Ishak Mekki.*

Bu Sadarestuwati, silakan. Siap-siap, Pak Harvey Malaihollo.

**F – PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
**Selamat sore salam sejahtera untuk kita semua,**

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Bapak Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi,  
beserta jajaran yang saya hormati,**

Saya langsung ke Pak Dirjen Bina Marga, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Novi, berkaitan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2022, Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Di mana kita nanti, atau APBN bisa mengintervensi untuk pembangunan atau perbaikan jalan baik itu di desa, kabupaten maupun provinsi, tentunya dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Apakah nanti tahun 2023 ini, kami bisa untuk mengajukan program tersebut? Karena sebagaimana kita ketahui, cukup banyak jalan-jalan di kabupaten yang rusak parah akibat dari *project-project* nasional yang selama ini memang sedang kita galakkan.

Kemudian yang kedua, Pak Dirjen, mungkin dulu sudah pernah kami sampaikan berikut juga dengan proposal pengajuannya, berkaitan dengan usulan untuk pembangunan pelebaran jalan untuk kawasan industri di utara Brantas, Kabupaten Jombang, yang meliputi Ploso, Kabuh dan Kudu. Mungkin nanti berikutnya adalah ke arah, kearah barat yang menuju Plandaan dan Nganjuk. Tetapi untuk tahap pertama ini, yang ke arah Mojokerto, kembali lagi ke Kabuh. Kemudian jalan besar yang Jombang, Lamongan, Tuban.

Dan juga saya sudah pernah mengajukan beberapa kali berkaitan dengan pembangunan *flyover* yang ada di Kertosono. Karena memang ini sangat membahayakan, walaupun kita sudah memiliki jalan tol. Akan tetapi tidak sedikit yang masih menggunakan jalan arteri yang melintasi di perempatan ya itu, perempatan yang ke kiri menuju Kediri, Purwoasri, ke kanannya Kertosono, yang ada rel kereta itu, Bapak, iya. Jadi saya mohon itu juga bisa diperhatikan. Dan juga satu lagi, saya mengingatkan lagi adalah *flyover* yang ada di Kota Mojokerto, yang terminal Kertojoyo, kalau tidak salah itu, Terminal Mojokerto itu.

*Nah*, selain itu yang saya ingin pertanyakan adalah berkaitan dengan kegiatan apa namanya, untuk, apa namanya, kerja Padat Karya Tunai untuk di Bina Marga khususnya untuk dapil saya sendiri, itu mencakup apa saja? Dan juga kami nanti mendapatkan alokasi untuk jembatan gantung itu berapa?

Karena mengingatkan juga, yang semestinya Mojokerto itu sudah selesai harusnya tahun ini, Bapak. Karena itu usulan sudah lalu-lalu. Tetapi sampai hari ini belum, padahal itu desa yang sangat terpencil, Pak, sangat terpencil. Jadi mohon juga, memang bentangannya sangat lebar, akan tetapi bukan berarti kementerian ini tidak bisa melaksanakan. Saya yakin, *haqqul* yakin, bahwasannya kementerian ini pasti bisa melaksanakan. Kepala desa juga sudah sanggup masyarakatnya untuk menyelesaikan tanah yang dibutuhkan untuk jembatan gantung ini.

Kemudian juga saya terima kasih, sudah juga diakomodir untuk beberapa jembatan yang sudah yang lalu terkena dampak banjir, Pak Dirjen. Terima kasih sekali.

Dan selanjutnya saya ke Pak Dirjen Bina Konstruksi.

### **Pak Dirjen,**

Saya juga terlalu sering menyampaikan berkaitan dengan hasil apa namanya, bukan, hasil-hasil semacam penelitian atau semacamnya yang dilakukan oleh, mohon maaf, perusahaan-perusahaan swasta. Seperti halnya yang berulang kali saya sampaikan, berkaitan dengan pembangunan untuk daerah-daerah yang rawan gempa. Dulu Pak Sucipto pernah menciptakan yang namanya konstruksi sarang laba-laba, yang hari ini juga sudah diperbaiki terus. Dulu pernah saya tanyakan, katanya karena ada dualisme, sehingga tidak bisa digunakan. Sekarang sudah tidak ada dualisme lagi pun, sampai hari ini tidak dipergunakan. Saya kira ini perlu ditinjau kembali. Karena bagaimanapun juga daerah kita sangat banyak yang rawan bencana baik itu gempa, ya khususnya gempa yang baik dari Jawa Timur ya dari wilayah Jawa, Sumatera, kemudian Sulawesi juga banyak sekali yang, Aceh juga, rawan terhadap bencana.

Saya kira hasil-hasil apa namanya, penelitian yang seperti ini harusnya bisa digunakan. Dan itu tidak hanya sarang laba-laba, tetapi banyak juga yang berkaitan dengan untuk mengatasi banjir. Jadi mungkin dari pihak Bina Konstruksi bisa berkoordinasi atau mengundang mereka-mereka yang mempunyai, apa, hasil-hasil penelitian yang bisa dikerjasamakan atau digunakan oleh pemerintah. Karena kenyataannya, beberapa hotel yang sudah dibangun dengan struktur sarang laba-laba itu ternyata ketika gempa juga tidak terkena dampak gempa, tidak, tidak roboh, tidak retak. Saya kira ini juga sesuatu yang menurut saya cukup bagus.

Dan berkaitan dengan untuk pelelangan di daerah, Bapak, saya kira memang sebaiknya untuk *project-project* kecil itu lebih mengutamakan pada kontraktor-kontraktor daerah. Saya kira ini untuk pemberdayaan juga, karena kalau tidak bisa jadi kontraktor-kontraktor kecil ini pada mati, mati suri. Padahal mereka untuk mendapatkan, apa namanya, perizinan dan lain-lain itu juga mengeluarkan biaya yang sedikit. Tentunya dengan harapan, mereka bisa ambil bagian dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di negara tercinta kita ini.

Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Dan kiranya dari Bina Marga kami bisa segera mendapatkan jawaban untuk program-program yang pernah kami sampaikan.

Terima kasih, Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

*Makasih, Bu Restu.  
Pak Harvey.*

**F – PDIP (HARVEY B. MALAIHOLLO):**

Ya, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Bersiap-siap,

**F – PDIP (HARVEY B. MALAIHOLLO):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Pak Tamanuri.

**F – PDIP (HARVEY B. MALAIHOLLO):**

**Yang terhormat Bapak Dirjen Bina Marga, Pak Hedy,  
dan juga Bapak Dirjen Bina Konstruksi,**

Saya hanya ingin membacakan aspirasi dari teman-teman di dapil saya. Yang pertama adalah, oh iya, saya mau mengucapkan terima kasih, karena di dalam pemaparan Bapak, ada program penanganan Tahun Anggaran 2023, banyak sekali yang dilakukan oleh Bina Marga untuk Papua Barat. Tapi ada yang juga menjadi usulan dari dapil saya, yaitu pembangunan jalan ruas Kaimana-Triton. Lalu juga pembangunan jalan ruas Wanoma-Inari-Nagora-Tamesan dan Wermenu, itu yang usulan dari dapil saya.

Satu lagi, Pak, ini saya alami sendiri, pada saat saya reses kemarin itu, saya dibawa untuk meninjau kawasan ekonomi khusus dan jalanan yang dibuat pada saat Bapak Presiden kita hadir untuk meresmikan kawasan ekonomi khusus tersebut, dibuat khusus di Kabupaten Sorong. Tapi kemarin waktu saya reses, itu hancur sekali jalannya, Pak. Sehingga akhirnya masyarakat yang mau menuju ke kawasan ekonomi khusus harus mempergunakan jalan lama,



karena jalan baru yang dibuat khusus untuk Pak Presiden waktu itu, sudah hancur sekali, lubangnya sangat besar-besar.

Itu saja Pak, terima kasih banyak, Pak Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya terima kasih, Pak Harvey.

Selanjutnya Pak Tamanuri, ya. Bersiap-siap, Bu Cen.

**F – P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Saya hanya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Bina Marga. Saya berterima kasih, ada 14 program yang Bapak sudah siapkan di tahun 2023 untuk Provinsi Lampung. Saya rasa semua jejaring jalan negara kena semua itu.

Yang perlu saya sampaikan, tambahan adalah *exit* jalan tol Terbanggi Besar, mohon dapat diperlebar sampai di Desa Pager lebih kurang 19 km, jadi kiri kanan ditambah 2 meter. *Kenapa?* Karena begitu keluar dari jalan tol ada penumpukan. Ada penumpukan mobil-mobil, karena dari jalan yang begitu lebar masuk ke jalan 6 meter atau 5 ½ meter. Jadi perlu pelebaran, 2 meter sebelah, 2 meter sebelah.

Kemudian satu lagi adalah dari Simpang Penawar Tulang Bawang menuju Rawagitu, memang di sini sudah ada. Cuma itu dibangunnya *kok* setengah-setengah *gitu*, 5 kilo, kemudian 3 kilo dibiarkan, 5 kilo lagi, 5 kilo lagi. Jadi saya harapkan ini pembangunan utuh sampai ke Ivilis itu ada namanya livil. Jadi lebih kurang 35 kilometer dari Simpang Penawar.

Saya rasa demikian, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

*Makasih*, Pak Tamanuri, ada yang mau diserahkan, Pak? *Enggak* ada ya? Baik. Bu Cen, bersiap-siap Bu Neng Eem.

**F – P. GOLKAR (CEN SUI LAN):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman,  
Juga Pak Dirjen dari Bina Marga dan Bina Konstruksi,**

Saya langsung saja, Pak Dirjen, Pak Hedy. Kemarin saya menerima RDPU dari masyarakat Jatikarya, masyarakat datang ke DPR, menyuarakan bahwa banyak mereka belum menerima ganti rugi. Sehingga waktu kejadian, mereka sempat menutup jalan tol, jalan tol Cimanggung dan Cibitung. Jadi waktu itu, hasil dari suara mereka bahwa uang konsinyasi itu tidak bisa dicairkan dari pengadilan. Bapak kan sudah menitipkan di sana, tapi tidak bisa dicairkan, mereka juga tidak tahu seperti apa, ini sudah sampai ke mana-mana. Bahkan mereka juga menampilkan, Ka.Balai berjanji tidak akan menjalankan tol itu dulu sebelum ada penyelesaian, tapi buktinya kan sudah berjalan tol itu. Jadi tolong diselesaikan, bagaimanapun mereka merasa dirugikan. Yang itu *aja* ke Pak Hedy.

Yang ke Pak Dirjen Bina Konstruksi.

**Pak Dirjen,**

Seperti yang selalu ini kita khawatirkan, di Kepri itu sudah ada 3 atau 4 paket program yang putus tengah jalan. *Nah*, itu bagaimana? Selalu saya bicarakan saya tanya kepada para Ka.Balai, mereka bahkan tidak dilibatkan. Ya itu itu BP2JK itu sendiri sangat tertutup istilahnya, *tau-tau* mereka sudah menerima bahwa yang menang ini bekerja setengah jalan, *enggak* sanggup lari. Hal-hal itu yang sebenarnya kita selalu bicarakan di dalam ruangan ini, bagaimana solusinya? Apakah ini akan terjadi terus menerus? Kemarin saya juga sampaikan kepada Pak Irjen ya, agar hal ini bisa ditindaklanjuti, jangan terjadi hal-hal seperti itu.

Demikian dari saya, Pimpinan dan Pak Dirjen, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

*Makasih*, Bu Cen, Bu Neng silakan.

**F – PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ., M.M.):**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Bersiap-siap, Pak Fadholi.

**F – PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ., M.M.):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
**Salam sejahtera untuk kita semuanya,**  
**Om Swastiastu,**  
**Namo Buddhaya,**

**Pimpinan beserta Anggota Komisi V yang saya hormati dan saya banggakan,**

**Mitra kerja Komisi V Bapak Dirjen Bina Marga dan Bapak Dirjen Bina Konstruksi,  
beserta jajaran yang saya hormati dan saya banggakan.,**

Pertama, Pimpinan, saya ingin menyampaikan beberapa bulan yang lalu kita melakukan kunsfik yang mana kunsfik itu didasari dari audiensi Bupati Halmahera Selatan. Bahwa mereka meminta bantuan terkait Peraturan Presiden RI No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Di mana di dalamnya terdapat kawasan industri Pulau Obi di Halmahera Selatan. Kemudian akhirnya berdasarkan surat itu dan berdasarkan audiensi dari mereka, kami terima, dan kemudian kami membalas dengan kunjungan ke Maluku Utara. Namun, karena infrastruktur di sana agak terbatas dan jauh, jadi kami tidak ke Halmahera Selatan-nya, tetapi sampai di Maluku, di Kantor Gubernur, tapi Bupati Halsehnya yang kemudian datang.

Sayang sekali, Pak, dari Eselon I maupun Eselon II tidak ada yang hadir, hanya Ka.Balainya saja yang hadir. Padahal itu kan lebih ke masalah infrastruktur jalan. Jadi ketika kami tanyakan pun, apa, Ka.Balainya juga jawabannya sangat menyakitkan kami, Pak. Maksudnya menyakitkan kami, kita sudah datang jauh-jauh kesana tidak tidur, pagi langsung kegiatan sampai kemudian sore. Terus mereka jawabannya hanya bahwa tidak ada untuk tahun 2023, ini yang ada hanya untuk Morotai dan lain sebagainya. Dan dari tahun ke tahun memang kebanyakan di Morotai.

Padahal secara faktual, Pak, mulai Maluku Utara menjadi ibukota provinsi baru menjadi provinsi baru karena pemekaran di Maluku. Tidak pernah, apa, tersentuh oleh pembangunan, termasuk infrastruktur di Halmahera Selatan. Dan kalau bicara kabupaten-kabupaten di sana, Halmahera Selatan ini ternyata penduduknya tertinggi ketimbang kabupaten-kabupaten yang lain, walaupun ibukotanya yang lain itu, Ternate sekalipun, itu penduduknya masih dibawah Halmahera Selatan, seperti itu. Jadi mereka juga menjadi bagian dari Indonesia, Pak. Tolong jangan ada diskriminasi. Jadi mohon itu bisa diakomodir dan bisa dijawab di tahun 2023, seperti itu.

Apalagi pemerintahan pusat mungkin juga sudah, karena di sana pusat apa, nikel, penghasil nikel dan lain sebagainya, juga sudah, tolong juga itu kemudian diperhatikan. Jangan hanya kekayaan alamnya saja yang kemudian dikeruk, tetapi pembangunannya diabaikan, itu yang pertama. Jadi tolong, Pak, ya kami sampai sakit-sakit pulang dari sana, Pak, ya karena tidak tidur *gitu* kan, itu yang pertama.

Terus kemudian yang kedua, saya sependapat dengan Pak Suryadi, bahwa selama ini Ka.Balai Bina Konstruksi maupun Ka.Balai Bina Marga kurang koordinasi dengan kami, Pak, di lapangan. Contoh misalkan masalah swakelola Padat Karya, itu tidak ada *tuh* koordinasinya dengan kita-kita, dengan kami-kami sebagai pemangku dapil. Secara konstitusional kita yang mewakili masyarakat ada di sana. Tetapi ketika ada kegiatan Padat Karya, apalagi ..., tidak pernah ada koordinasi itu. Jadi dari situ kita bisa membuktikan

bahwa sebenarnya ternyata kita tidak dianggap, Pak. Seperti bahwa kita adalah mitra kerja tetapi ternyata tidak ada manifestasinya, tidak ada wujudnya seperti.

Oleh karena itu mohon, Pak, apa, kemitraan kita itu diperbaiki, Pak, jangan hanya kemudian Pak Menteri baik-baik tapi kemudian di bawahnya itu ya tidak ada. Hanya mereka ya seperti itu, hanya menjawab dengan ya formalitas. Lah kita juga ya sudah tahu yang formal-formal itu, Pak, sudah tahu kita, tidak perlu dikasih tahu lagi *gitu* kan. Jadi *kayak* semacam mereka *enggak* mau tahu tapi pura-pura tahu, *gitu*, pura-pura baik, siap, siap, siap, tapi sebenarnya tidak mau tahu. Ketika di apa, sudah lah apa, di belakang kita, "Sudahlah, kita tinggal saja" dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak, jadi kami merasakan seperti itu, *gitu* kan.

Padahal kalau kita bicara kita dari forum dari tahun-tahun sebelumnya bahkan dari periode sebelumnya. Saya sering menyuarakan terkait drainase untuk jalan-jalan nasional, itu kami yang sering vokal itu. Tetapi ketika ada kegiatan di dapil saya, kita dicuekin, Pak. Itu masyarakat kita yang nanya, "Ini *kok* apa, Bu Eem *enggak* bisa ya mengakomodir kita yang kehilangan pekerjaan karena Covid dan sebagainya", seperti itu. Tolong, Pak, itu apa, komunikasi sinergitas kita, koordinasi itu, tolong diperbaiki, Pak, seperti itu. Jangan sampai kemudian kita ya seolah-olah bukan apa, mitra, *gitu*.

Dan saya berharap, ini sering saya suarakan dari rapat ke rapat, tetapi sampai hari ini tidak pernah ada realisasinya. Saya berharap, kegiatan-kegiatan besar yang ada di dapil kita, minimal, Pak, sepakat dengan teman-teman, Bu Estu, terus kemudian yang lain tadi, bahwa pengusaha lokal itu harus diprioritaskan ketimbang yang di luar tersebut, kecuali kalau memang tidak ada kemampuan, seperti itu. Dan kalau misalkan ada, tetapi tetap harus melibatkan minimal yang masyarakat-masyarakat lokal. Jadi dari sisi misal *kayak unskill-nya* ya, mereka masyarakat disekitarnya harus dilibatkan, seperti itu. Biar masyarakat yang mendapatkan pembangunan di situ juga merasa memiliki dan memelihara, Pak, seperti itu. Jangan sampai mereka merasa ada pembangunan dan lain sebagainya itu.

*Nah*, terus kemudian yang ketiga, jalan nasional lintas selatan, Pak, yang melewati Cidaun, Bandung, itu kan sebenarnya menjadi jalan nasional tuh sudah sangat lama ya, Pak, ya, sudah sangat lama. Ternyata saya juga baru tahu dan agak aneh juga sebenarnya, ada masyarakat yang mengeluhkan bahwa beberapa ketika pelebaran jalan dari jalan bukan nasional statusnya menjadi jalan nasional, ada beberapa tanah masyarakat yang belum ada ganti rugi. *Nah*, saya akhirnya mereka memang tidak terlalu berharap, karena memang itu sudah lama. Tetapi mereka meminta, "Coba tolong *sih* mekanismenya seperti apa, bisa ditelusuri *enggak*, jangan-jangan dari Kementerian PUPR nya mungkin sudah, tetapi kemudian dari bawahnya yang belum sampai kepada masyarakat". Karena ini kan sudah sudah lama *banget gitu* kan, aneh ketika ada masyarakat yang menanyakan hal itu.

Akhirnya mereka meminta saya untuk menelusuri seperti apa sebenarnya dan itu adalah kewajiban siapa, seperti itu. Saya hanya menjawab,

“Ya karena itu adalah aset menjadi aset negara, biasanya itu adalah Kementerian Keuangan, Perbendaharaan, tetapi nanti akan kami tanyakan”, saya janjinya seperti itu, “Akan kami tanyakan pada saat rapat”. Maka ini adalah sebagai janji saya kepada masyarakat untuk meminta saya untuk menelusuri seperti skemanya itu seperti apa, karena ini sudah, sudah, sudah lewat lama.

Terus kemudian saya sepakat juga dengan teman-teman, Pak. Saya kira apa, di Bina Marga ini kan jembatan gantung, ini sebenarnya yang menjadi favorit ya bagi kita, karena apa? Karena kita bisa menentukan titiknya, seperti itu. Saya berharap jembatan gantung ini agak diperbanyak, Pak, untuk tahun 2023 itu, jangan hanya bisa *ngajuin* satu atau dua dan lain sebagainya, itu yang pertama.

Terus kemudian untuk Bina Konstruksi, ini pelatihan pertukangan ini yang sekarang ini *kok* mekanismenya agak-agak sulit, terus kemudian *enggak* seperti yang lama, Pak. Tolong ini jangan terlalu dipersulit, harus agak fleksibel *gitu* kan, itu agak-agak ribet mekanisme yang sekarang ini, untuk pelatihan pertukangan, itu agak-agak ribet. *Nah*, saya berharap pelatihan pertukangan yang ada di Bina Konstruksi itu, itu diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Bina Marga, Pak.

Jadi ketika alumni pelatihan pertukangan itu sudah mendapatkan sertifikat, mereka langsung bisa dilibatkan di pekerjaan-pekerjaan yang ada di daerahnya tersebut, pekerjaan-pekerjaan yang ada di Bina Marga. Apakah itu yang swakelola Padat Karya itu, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Yang misalkan walaupun yang besar, kan ada pasti di dalam setiap *project* itu ada yang *skill*, ada yang *unskill*-nya, itu kan bisa di, bisa di apa, fungsikan langsung. Jadi tidak hanya sekedar setelah itu, terus kemudian selesai. Jadi biar ada apa, sinergitas, biar ada jadi terintegrasi *gitu*, Pak, seperti itu. Mungkin itu saja, terima kasih.

*Wallahumuafiq Illa aqwamittoriq,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, Bapak-Ibu sekalian, sekarang sudah masuk jam Maghrib, karena masih ada 7-8 orang, ini pasti nabrak. Saya pikir biar sholat dulu kita, Maghrib, yang makan, makan malam dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Saya skors selama setengah jam.

#### **(RAPAT DISKORS PUKUL 18.10 WIB)**

Saya lihat semua sudah selesai makan dan sholat ya, Pak Hamka boleh kita lanjut, Pak?

**F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Baik, skors saya cabut.

**(SKORS DICABUT PUKUL 19.00 WIB)**

Kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab ya, saya berharap waktu kita bisa persingkat ya, Bapak-Ibu sekalian.

Tadi sampai di Bu Neng ya? Sekarang, Pak Fadholi, tadi sudah? belum ya? belum ya? sekarang Pak Fadholi, bersiap-siap Pak Fauzi. Ya silakan, Pak Fadholi, kalau bisa pendek *ndak* perlu panjang, Pak, saya persilakan. Yang penting kekar, Pak.

**F – P. NASDEM (Drs. FADHOLI, M.Ikom):**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Yang penting kekar, silakan.

**F – P. NASDEM (Drs. FADHOLI, M.Ikom):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pak Ketua dan Bapak Ibu Anggota Komisi V,  
Bapak Dirjen yang saya hormati,**

Yang pertama, pada Bapak Dirjen Bina Marga, Pak. Terima kasih, di ada alokasi 15 *item* di wilayah Jawa Tengah. Saya perlu menyampaikan beberapa hal yang mungkin menjadi kajian dan nanti juga menjadi pertimbangan.

Yang pertama itu jalan dari Solo kan kemudian Salatiga, terus langsung ke Grobogan, kemudian sampai Demak, Pak. *Nah*, ini *nyambungnya* dari Salatiga ke Grobogan itu cukup parah Pak, kan lumayan, itu mungkin jadi hal itu, jadi mungkin itu sebandingnya jadi sama dengan kalau dari Kendal ke mana itu, Weleri, kemudian ini kan ada Kendal ke Weleri juga ada ini. Tapi itu sudah bagus, jadi itu yang menjadi usulan saya.

Dan ada beberapa hal yang nanti tentu saya akan lakukan koordinasi dengan Ka. Balai dan saya juga menyiapkan terima kasih bahwa Ibu Ka. Balai dan seluruh jajarannya cukup kooperatif dan ketika kemudian ada beberapa hal, termasuk di jalan-jalan yang memang itu nanti akan ada skala prioritas.

Kemudian yang berikutnya adalah akan ada *exit* jalan tol di Salatiga itu, tolong untuk juga nanti bisa diperhatikan. Karena Salatiga sudah membebaskan tanahnya, Pak, dari Kota Salatiga itu kan sudah membebaskan tanahnya, dan sekarang masih ada kekurangan dana yang kemarin sedang dipikir dan kemarin sudah dibicarakan sama Pak Ganjar, Pak Gub, ternyata dan itu nanti akan sudah ditindaklanjuti. *Nah*, mohon itu harapannya itu nanti bisa terealisasi pada tahun 2023.

Hal-hal yang lain, saya sudah mengikuti arahan Pak Ketua, dan pada Bina Jasa Konstruksi, Direktur Jasa Konstruksi, intensnya ini *aja*, Pak, nanti dipermudah untuk pelatihan *aja*, Pak, *gitu aja*, kita akan ajukan untuk pelatihan untuk bisa dipermudah.

Terima kasih, Pak Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

#### **KETUA RAPAT:**

*Makasih*, Pak Fadholi, jadi Bapak membuktikan kalau bisa pendek dan kekar kenapa tidak, *gitu loh*, Pak, ya kan jangan panjang-panjang, sudah malam, maksud saya.

Silakan Pak Fauzi, pendek kekar Pak, ya.

#### **F – P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):**

Hahaha, panjang-panjang *dikit* ini. Ya, *makasih*.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Saya langsung saja, yang pertama untuk Bina Marga. Kalau kita melihat, Pak, ya, program Padat Karya dari total anggaran pagu 4,31 triliun, dirjen telah membukukan realisasi keuangan 1,47 triliun atau 34,12% dari total anggaran. Jika dilihat dari *item* pekerjaan, Pak, program Padat Karya dengan tingkat realisasi yang masih sangat memprihatinkan, Pak, terutama pada Padat Karya non rutin 19,57% dan Padat Karya rutin jembatan swakelola 36,53%. *Nah*, pertanyaannya, *kenapa* kondisi ini masih apa, sangat memprihatinkan, Pak, itu.

Kemudian meski tingkat serapan tenaga kerja di Dirjen Bapak, ya sudah cukup baik, Pak, ya. Tapi dalam realisasinya Padat Karya masih 34,12%, *nah* kira-kira langkah apa, Pak, yang akan Bapak lakukan dalam sisa bulan dalam hal untuk penyerapan sisa penyerapan ini, Pak?

Kemudian, Pak, yang ketiga, saya kemarin saat kunsfik, Pak, di jalan tol itu, Pak, saya sempat menyampaikan kepada apa, rekan Bapak atau anggota Bapak, *kayaknya* suatu saat kita perlu, Pak, ya, membuat studi mengenai dampak sosial dari pembuatan jalan tol, Bapak, *gitu*. Ada beberapa pengamat menyatakan, tadinya saya *enggak* begitu perhatian, Pak. Tapi setelah saya

kunjungan, misalkan ke Purwakarta atau apa, jembatan timbang waktu itu ya, saya lewati arah yang mau ke Cirebon, Pak, ya, itu pedagang rata-rata hampir mati suri, Pak. Karena orang mau ke arah Cirebon itu masuk tol Cipularang, Pak. Begitu juga Makassar, Makassar itu setelah dari jalan tol sendiri, tol di atas, di bawah itu, Pak, warung-warung hampir semuanya, Pak, memprihatinkan, Pak.

*Nah*, kelihatannya, Pak, kita perlu melakukan studi masalah, Pak, ya, bagaimana jalan keluarnya. Ya memang ada jalan keluarnya, ada *rest area*. Tapi berapa banyak *sih rest area* yang disediakan? apakah bisa menampung itu semua *gitu*. *Nah*, ini memang PR kita bersama, Pak, untuk bagaimana menyelesaikan ini, Pak, sehingga tidak ada dampak sosialnya terlalu tinggi.

Kemudian saya lihat di beberapa daerah, setiap kita kunjungan itu, pemerintah daerah, pimpinannya tidak hadir, Pak. *Nah*, ini apakah memang koordinasinya sangat lemah atau seperti apa? *Nah*, ini saya juga apa menghimbau untuk ke depan ini, teman-teman PUPR agar meningkatkan koordinasinya. Saya *enggak* tahu dimana permasalahannya, karena hampir setiap ada program-program sifatnya vertikal itu teman-teman pemerintah daerah agak kurang *respect, gitu*, Pak, ya kelihatannya. Walaupun dampaknya, pemerintah daerah menikmatinya, *gitu*, Pak.

Kemudian ini untuk apa, temuan di dapil, Pak. Temuan di dapil, saya masih melihat, Pak, di beberapa kegiatan-kegiatan di dapil, vendor-vendor dalam melaksanakan pekerjaannya, belum melakukan SOP Pak. Misalkan tidak ada tanda peringatan sedang ada pekerjaan dan lain-lain itu, Pak, tolong, Pak, itu pengawasannya lebih ditingkatkan, Pak.

Kemudian apa, komitmen daerah terpencil, Pak, dalam rapat ini pernah kita sepakati, di ruangan ini, Pak, ya. Daerah terpencil terutama di dapil saya, di Sekorampi itu, Pak, mudah-mudahan 2023 sekali lagi bisa di, bisa apa, bisa disentuh.

Berikutnya juga di daerah bencana, khusus di Masamba, di Luwu Utara juga, Pak, dua tahun yang lalu ada banjir bandang, sampai sekarang ini drainasenya kota dan ya apa, sungainya masih menjadi momok bagi masyarakat Luwu Utara. Hari ini, Pak, tadi saya sampaikan ke Bapak, banjir kembali di Luwu Utara, Pak, jadi paling tidak penanganan awalnya bisa di apa, di apa, dikedepankan, Pak. Selanjutnya mungkin mudah-mudahan yang sifatnya permanen, bisa dijalankan.

Kemudian untuk Dirjen Bina Konstruksi, saya kemarin itu, Pak, di dapil saya, itu hampir menyelenggarakan pelatihan pertukangan, Pak. Tetapi itu dibatalkan karena, ternyata sekarang ini kan, saya *enggak* tahu kemarin-kemarin ada kerja sama atau tidak dengan badan sertifikasi, Pak, ya. *Nah*, ini ada perbedaan sertifikasi harus ada dananya dulu, sementara kalau PUPR kan katanya pelaksanaan dulu, baru dana itu turun, *gitu*, Pak. *Nah*, saya *pengen* dapat informasi juga, Pak, apakah di reses yang akan datang, biasanya kan



saya minta untuk diselenggarakannya di tengah-tengah reses, reses pribadi, Pak, ya, itu bisa di, bisa dijalankan.

Dan kemudian juga yang sekolah pelatihan pertukangan yang kemarin, Pak, ada beberapa peserta yang sampai saat ini belum mendapatkan sertifikatnya, Pak. Dan kira-kira kapan, Pak, apa, peserta dari pelatihan pertukangan itu menjadi syarat peserta tender, Pak. Jangan sampai juga mereka sudah dilatih, ternyata tidak dipakai, Pak. Dan ini juga dalam rangka menjaga kualitas, Pak, kalau yang pekerjanya lulusan dari apa, pelatihan pertukangan itu, Pak. Saya pikir sudah mulai harus dipikirkan, apalagi kalau semakin cepat semakin bagus, untuk ini menjadi salah satu persyaratan, apa, peserta tender yang menggunakan tenaga kerjanya yang sudah bersertifikasi yang kita jalankan sekolah pelatihan tersebut.

Saya pikir itu, Pak, yang bisa saya sampaikan, *makasih*, Pak Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

#### **KETUA RAPAT:**

*Makasih*, Pak, semakin cepat semakin bagus.

Baik, selanjutnya, Pak Syafiuddin.

#### **F – PKB (H. SYAFI UDDIN, S.Sos.):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh, Bil ikhtishor,*

Langsung, Pak Dirjen Bina Marga. Untuk tahun 2022 ini saya ucapkan apresiasi kepada jajaran Bina Marga, terutama di Balai BP2JN Jawa Timur terkait dengan program Padat Karya. Kalau tadi teman-teman mengatakan kurang mengapresiasi, saya sebagai Anggota DPR RI Dapil Madura mengucapkan apresiasi luar biasa kepada teman-teman Balai BP2JN Jawa Timur ya dan Bali. Karena sudah melakukan komunikasi yang baik dan *alhamdulillah* penyerapan tenaga kerja di Padat Karya itu, *alhamdulillah* betul-betul tepat sasaran. Sehingga banyak keluhan-keluhan, bukan keluhan ya, apresiasi positif, baik kepada Bina Marga atau saya pribadi sebagai Anggota DPR RI Dapil Madura.

Yang kedua juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen, terkait dengan penghapusan pintu tol yang kemarin masih ada. Tapi setelah saya sampaikan di forum ini, *Alhamdulillah*, biang kemacetan terhadap arus Lebaran kemarin ini sudah di apa namanya, sudah digusur, Pak, dan *alhamdulillah* saya ucapkan terima kasih yang kedua kalinya kepada Pak Dirjen dan jajaran yang ada.

Tapi ada keluhan yang mungkin juga ini menjadi aspirasi, Pak, Pak Dirjen. Terkait dengan jembatan Suramadu yang menjadi ajang tempat bunuh diri. Sudah ada kalau *enggak* salah enam orang, Pak, itu melakukan bunuh diri di jembatan Suramadu. Banyak aspirasi, banyak komplain kepada saya pribadi untuk disampaikan kepada Pak Dirjen. Ada solusi atau mungkin ada penambahan ketinggian pagar itu, jangan sampai apa namanya, di bawah ketinggiannya orang, Pak. Jadi kalau bisa lebih ditinggikan lagi, sehingga walaupun ada keinginan untuk bunuh diri, ini masih agak lama *gitu*. Sehingga bisa, bisa apa namanya, bisa ditegur dan dilihat oleh orang-orang yang berlalu lalang di situ *gitu* kan. Ya, atau ada kawat berduri atau apalah pokoknya, antisipasinya. Karena apa? Sudah menjadi tren ini, kalau mau bunuh diri di Suramadu, *gitu loh*. Malah ada salah satu aparat TNI Angkatan Laut kalau *ndak* salah yang bunuh diri waktu itu. Jadi itu keluhan yang disampaikan oleh masyarakat Madura, Pak, Pak Dirjen. Karena Suramadu ini adalah salah satu *icon* yang kebanggaan masyarakat Madura, sehingga kalau dicerai dengan atau dinodai dengan tren bunuh diri ini, ini *enggak* bagus lagi, *gitu* kan.

Yang kedua, yang ketiga, ini yang terakhir, kepada Pak Dirjen Bina Marga. Kalau kemarin juga terakomodir terkait pelebaran jalan nasional dari Kamal-Sumenep, walaupun itu *multiyears*. Tapi itu di jalur tengah, Pak. Sekarang ada lagi aspirasi, saya minta di jalan nasional tapi di jalur utara, pelebaran jalan itu. Karena memang program Padat Karya ini lumayan bagus, Pak, kalau memang betul-betul tepat sasaran. Karena banyak orang Madura ini *ndak* punya pekerjaan. Walaupun punya pekerjaan itu, apa, pendapatannya di bawah 500 ribu dalam satu bulan, sehingga Madura, dua kabupaten ini menjadi wilayah miskin ekstrim. Sehingga Dirjen Bina Marga sesuai Inpres No. 4 tahun 2022, wajib juga untuk menggelontorkan anggaran itu sebanyak-banyaknya ke Madura, itu mungkin, Pak Dirjen.

Untuk Bina Konstruksi, mulai dari Dirjen Binkon yang awal saya jadi Anggota DPR RI, ini berkali-kali kita katakan bahwa Bina Konstruksi ini betul-betul harus profesional, berkualitas dan kerja, *gitu loh*. Jangan yang hanya nomor urut 1, pemenang terendah saja yang menang terus, Pak. Sehingga seperti program Padat Karya yang saya aspirasikan itu juga ditawarkan sampai lebih dari 25%. Kita sepakat di forum ini, kalau lebih dari 20% itu penawaran itu ya dicoret saja. *Masak* Padat Karya yang hanya 3 miliar itupun di yang menang penawarannya itu 27% turunnya *gitu* kan, sehingga menang 73%. *Nah*, seperti apa, menurut teori ekonomi, ilmu ekonomi kan, perputaran uang yang banyak itu menambah pertumbuhan ekonomi di daerahnya, Pak.

*Nah*, sekarang kalau sudah di desa itu sudah segitu, apalagi *ndak* dikerjakan secara Padat Karya seperti apa namanya, seperti di dirjen-dirjen yang lain. Ini lelang, maka saya berharap bahwa Binkon ini betul-betul anak buahnya jangan hanya tidur, *gitu loh*. Jadi betul-betul profesional, tetap ada pendekatan kearifan lokal, kita tidak intervensi harus orang Bangkalan, harus orang Madura. Namun tentunya kearifan lokal pun itu menjadi sebuah bagian kebijakan daripada Bina Konstruksi ini.

Mungkin itu Ketua, terima kasih. Kurang lebihnya, saya mohon maaf.

*Wallahumuafiq Illa aqwamittoriq,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

*Makasih, Pak Syafiuddin.*

Pak Willem Wandik, silakan.

**F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Baik.

**Pak Ketua dan juga rekan-rekan,  
Dan Dirjen Bina Konstruksi dan juga Bina Marga beserta seluruh jajaran  
yang kami hormati,**

Pertama kepada Dirjen Bina Marga, kami memberikan apresiasi atas capaian kinerja 2021-2022, baik kegiatan sifatnya reguler maupun juga terkait program terkait direktif selama 2021-2022 ini. Dan kami berharap, agar Inpres yang telah disampaikan oleh Pak Menteri mengenai jalan daerah, secepatnya dapat dikeluarkan dan diimplementasikan di tahun 2023 ini. Karena hal ini penting, mengingat *gap*, adanya *gap* antara kemantapan jalan nasional dengan jalan daerah, yang tentu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.

Yang berikut, terkait dengan kegiatan tahun 2022-2023, kami mendukung penuh untuk penyelesaian pembangunan jalan Trans Papua. Karena jalan ini *legacy* politik Presiden Jokowi di tanah Papua, yang menjadi urat nadi kegiatan mobilitas penumpang maupun barang. Oleh karena itu, Pak Dirjen perlu juga perhatikan preservasi bagi jalan dan jembatan di Papua. Diantaranya salah satunya adalah jalan yang menghubungkan Kabupaten Wamena-Jalimo-Mamrangu Tengah dan Lanijaya-Tolikara-Puncak Jaya dan Puncak Papua. Karena seringkali juga kendaraan yang selalu melintasi jalan ini juga kadang tidak sesuai kapasitas daya jalan itu. Sehingga seringkali rusak, terkadang, saya kadang apa seringkali tidur di luar, kadang tidak terkejar target waktu saya dari sana turun ke Wamena, terus juga ke Jayapura bakal lanjut ke sini.

Dan juga terkait dengan jalan lingkaran Danau Panyai, dalam rangka peningkatan destinasi wisata danau dan juga menghubungkan kawasan di sekitarnya, ini dalam rangka peningkatan anggaran, perlu dipikirkan, bila tetap lewat danau, sangat, kalau bila tetap lewat danau itu sangat mahal biayanya. Mungkin bagaimana teknisnya, mungkin perlu dipikirkan, perlu diakali, dalam rangka penghematan anggaran.

Dan juga saya mau tanyakan, apa jembatan timbang di Wamena yang pernah dulu kita usulkan, apakah sudah jadi atau belum, sudah dibangun atau belum, kami perlu jawaban.

Dan yang berikutnya Pak Ketua, tadi saya tadi pagi saya dari ....

**KETUA RAPAT:**

Tolong, tadi jembatan timbang apa jembatan gantung, Pak?

**F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Jembatan timbang.

**KETUA RAPAT:**

Hah?

**F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Jembatan timbang.

**KETUA RAPAT:**

Oh.

**F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

*Sorry*, jembatan gantung memang perlu juga karena kita di sana banyak sungai, banyak kali, tapi kami tidak punya jembatan gantung. Terima kasih Pak Ketua sudah ingatkan.

**KETUA RAPAT:**

Justru Bapak jawab jembatan gantung, saya tambah bingung, Pak, *eh* jembatan timbang.

**F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Terus yang berikut, tadi, Pak Ketua, tadi saya terima teman-teman penyelenggara dari NTT, kebetulan Pak Ketua dan teman-teman semua pada ada di sini. Saya yang terima tadi. Dan mereka pakaikan saya ini dan juga selendang ini. Tadi kami menerima aspirasi, kalau ada audiensi dari teman-teman penyelenggara di NTT, khususnya Kabupaten Manggarai tolong diterima, Pak Dirjen, dan juga Pak Dirjen Bina Konstruksi dan juga Dirjen Bina Marga. Di mana ada pembangunan yang ada sekarang eksisting Labuan Bajo dan juga jalan, perlu diperhatikan. Kawasan ini kawasan strategis yang menghubungkan sejumlah kabupaten di sekitar itu dan juga provinsi dan juga sejumlah titik yang menjadi pusat destinasi wisata.

Dan kepada Pak Dirjen Bina Konstruksi, kami menghendaki agar ada afirmasi untuk peningkatan SDM lokal di Papua. Perlu ada tanggungjawab moral terhadap pelaksanaan pembinaan tenaga kerja yang dilakukan oleh Kementerian PUPERA melalui Dirjen Jasa Bina Konstruksi dalam rangka mendukung sertifikasi dan juga kompetensi tenaga kerja di daerah masing-masing, ini perlu.

Saya, Pak Ketua, kebetulan saya Ketua Umum GAMKI, pernah juga dari salah satu departemen dari GAMKI pernah audiensi dengan Kementerian PUPERA dalam hal ini Dirjen terkait jasa konstruksi, mungkin lewat, kalau tidak salah waktu itu, pernah audiensi untuk bagaimana ada kerja sama melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja di daerah dalam rangka peningkatan kompetensi dan juga sertifikasi.

Oleh karena itu kami harap supaya bisa ditindaklanjuti, ada sejumlah daerah seperti di Kalimantan, dapilnya Pak Ketua, dan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, itu sangat mengharapkan kerja sama seperti itu. Dan juga seperti kami di Papua dan juga seperti Nias, itu dibutuhkan, seperti Sumatera Utara juga perlu. Yang perlu kita lakukan kerja sama dalam rangka peningkatan kompetensi dan sertifikasi.

Pak Ketua, itu yang mungkin bisa dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf kalau ada kesalahan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

*Makasih, Pak Willem.*

Selanjutnya Pak Muhammad Aras.

**F – PPP (DR. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):**

Terima kasih, Pak Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Selamat Malam dan Salam sejahtera buat kita sekalian,*

**Yang terhormat Pak Ketua dan Pimpinan,  
Beserta teman-teman Anggota Komisi V,  
Yang saya hormati Pak Dirjen Bina Marga, Dirjen Bina Konstruksi,  
Dan seluruh jajaran yang sempat hadir pada malam hari ini,**

Pertama-tama tentu penyampaian terima kasih yang pada kesempatan ini dari dapil kami, Pak, yang tentu mendapat perhatian dari teman-teman dari PUPR, tidak terkecuali dari seluruh dirjen dan badan yang ada, atas seluruh program-program yang telah sampai ke dapil kami.

Yang kedua, tentu sekali lagi kami tentu menginginkan apa yang menjadi usulan-usulan yang pernah kami sampaikan melalui forum ini maupun tertulis, agar kiranya itu menjadi perhatian dan bisa dimasukkan dalam program di tahun 2023. Antara lain adalah bahwa jalan nasional yang dikatakan bahwa itu mantap sekian puluh persen, faktanya juga di daerah tidak begitu terlihat kemantapan itu. Bahkan kalau menurut kami, kemantapan itu hanya sekitar 60 sampai 70%. Oleh karenanya, preservasi jalan ini sangat penting dan mendesak untuk kita lakukan. Apalagi di tahun 2023, tahun terakhir dalam melakukan program untuk di PUPR. Dan juga ya kita semua bersama dengan pemerintah juga berakhir di tahun 2024. Tentu di momen ini yang paling pas untuk kita bisa memaksimalkan seluruh potensi yang bisa kita turunkan kepada masyarakat. Sehingga tentu apa yang menjadi komitmen dan janji kami dan janji pemerintah kepada masyarakat, tentu bisa dicapai, paling tidak infrastruktur jalan dan sebagainya.

Detailnya, Pak, misalnya dari Maros sampai Bone, ya, terima kasih sudah diperhatikan kemarin, di khusus Kopeng dan KCPE, sudah terselesaikan 4 kilo dan sekarang sementara pengerjaan kurang lebih 4 kilo, masih ada tersisa kurang lebih 26 kilometer, Pak, untuk bisa lebih maksimal. Sehingga berharap untuk tahun 2023 bisa lebih memaksimalkan anggarannya, dan terakhir 2024 supaya bisa dituntaskan, Pak. Karena ini jalan yang nasional yang dipindahkan, tentu ini membutuhkan perhatian khusus, karena memang tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Ya sehingga berharap untuk di tahun 2023 sudah bisa sebagian besar terselesaikan.

Yang kedua, saya dapat informasi dari Pak Ka.Balai bahwa anggaran untuk di Alekappang, Camba dan sekitarnya, sudah dilakukan pelelangan. Ya mudah-mudahan ini secepatnya, dan tentu pemilihan pemenang ya harus betul-betul diperhatikan oleh Bina Konstruksi. Sehingga jalan nasional yang tadinya butuh anggaran yang cukup besar, betul-betul bisa maksimal kualitasnya. Sehingga ini bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang, sehingga tidak terus menerus kita memperbaiki jalan, belum sampai ke ujung, ya rusak lagi di tempat yang sebelumnya. Sehingga betul-betul harus memperhatikan segi kualitas dan ini menjadi perhatian kita.

Yang kedua, ini Maminasata juga sudah ada di program tahun 2023. Dan sesuai juga janji Pak Dirjen pada kesempatan sebelumnya, bahwa itu akan mulai digarap lagi tahun 2023. Mudah-mudahan ini tidak ada kendala dan seluruh persyaratan supaya bisa dimaksimalkan sebelum ini dilaksanakan. Karena ini juga sangat membantu untuk mengurai kemacetan antara Maros dan Makassar dan Makassar untuk ke daerah Sungguminasa dan Takalar. Sehingga kita harapkan bahwa sebelum 2024, ini sudah bisa berfungsi untuk melayani pergerakan masyarakat, baik dari selatan ke utara maupun sebaliknya.

Dan yang terakhir, untuk Bina Konstruksi, tentu berharap bahwa perusahaan-perusahaan lokal ya supaya bisa diberdayakan, tidak hanya misalnya semua dari pusat. Ya bahkan ada apa namanya, perbicangan

diantara teman-teman, bahwa teman-teman di Jakarta, di Sumatera, buat aturan-aturan sendiri, sehingga mereka bisa menang di tempat tertentu. Lalu kemudian itu disubkonkan di tempat yang lain. *Nah*, tentu ini harus diatur sedemikian rupa sehingga perusahaan lokal juga bisa menikmati dari pembangunan nasional yang ada.

Barangkali itu Pak Ketua, terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Pak Muhammad Aras.

Pak Bakri? Terakhir dari anggota, Pak Bakri.

**F – PAN (H.A. BAKRI, HM., S.E.):**

Baik, makasih.

**Pak Dirjen, Pak Ketua, serta Anggota,**

Saya sudah baca dari bahan yang disampaikan oleh Pak Dirjen Bina Marga. Ada satu catatan mungkin yang pingin saya sampaikan ini mungkin bisa menjadi usulan di 2023. Yaitu *anu*, Pak Dirjen, di Jambi itu ada namanya UIN ya, Universitas Islam Negeri, dulu pernah mendapat bantuan jalan lingkar di dalam. *Nah*, ini tidak salah kalau tahun 2023 ini mohon bisa dilanjutkan lagi, karena akan ada kegiatan yang sifatnya nasional nanti di situ. *Nah*, kemarin secara tertulis juga sudah saya sampaikan, itu saja mungkin dari Dirjen Bina Marga.

Ke Jasa Konstruksi, Pak Dirjen, ini sudah tahun kedua, Pak, di Jambi itu ada kegiatan yang sudah diumumkan, *tau-taunya* dibatalkan. Tahun 2021 itu programnya kegiatannya di Cipta Karya, sekolah. Dan saya tidak bayangkan Pak Dirjen, *gimana* jadinya termakan waktu, apalagi ini pekerjaan sifatnya gedung. Sehingga sampai kemarin itu tertatih-tatih, Pak, balai itu untuk menyelesaikan kegiatan pembangunan sekolah. *Nah*, tahun ini, di balai itu, Balai Jasa Konstruksi itu satu lagi terjadi lagi kegiatan di Sumber Daya Air. *Nah*, dibatalkan lagi, *nah*, saya *enggak* tahu *nih kenapa* bisa begini, begitu. Dan dalam waktu yang, tahun yang berdekatan. Apakah ada kelalaian daripada Balai atau Pokjanya, apakah mungkin karena Pokjanya terlalu lama sehingga diulang-ulang terus?

*Nah*, saya sarankan kalau bisa Pokjanya di *anu* lah ditukar atau ditempatkan tempat yang lebih bagus, jangan ini-ini terus karena juga menjadi pembicaraan di luar, Pak. Itu saja mungkin, ya? Itu menjadi pembicaraan di luar. Tidak salah lah, saya pikir carikan tempat yang lebih bagus lah Pokjanya. Karena sudah hampir tiga tahun apa empat tahun, *eh* dua tahun apa tiga tahun, sudah terlalu lama *gitu*. Itu saja mungkin, Pak Dirjen Jasa Konstruksi.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

*Makasih, Pak Bakri.*

Selanjutnya kita ke virtual. Pak Mulyadi.

**F – P. GERINDRA (Drs. H. MULYADI, MMA.):**

Siap, selamat malam.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F – P. GERINDRA (Drs. H. MULYADI, MMA.):**

*Sorry, di perjalanan, izin, Pak Dirjen, sebelumnya saya mohon maaf.*

Terima kasih, Pak Ketua.

**Yang saya hormati dan rekan-rekan Anggota Komisi V, Bapak-Ibu yang hadir secara fisik maupun virtual, Pak Dirjen Bina Marga yang saya hormati beserta seluruh jajaran, serta Pak Dirjen Bina Konstruksi,**

Izin, saya mengambil kesempatan ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Pak, khususnya di wilayah Jawa Barat. Saya mendapatkan informasi, Pak, terkait Peraturan Presiden Republik Indonesia, Pak, Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, Pak. Saya kira itu harus juga menjadi bagian perhatian Pak Dirjen Bina Marga, khususnya, supaya apa yang sudah dijadikan komitmen pemerintah pusat bisa *deliver*, Pak, terhadap program-program pembangunan ke depan.

Kemudian kedua, Pak, saya mendapatkan info juga ada permintaan dari Pak Gubernur ke Menteri Bappenas terkait laporan kondisi infrastruktur jalan khususnya Jawa Barat, Pak, ya. Ada kebutuhan untuk pendanaan penanganan rekonstruksi dan pemeliharaan jalan Jawa Barat, Pak. Memang saya rasakan sekali, Pak, jalan-jalan di Jawa Barat memang harus perlu perhatian khusus, Pak Dirjen. Kemudian walaupun memungkinkan, Pak, khusus mungkin Bapak harus ada tim yang bisa meninjau sambungan dari Cibubur-Cileungsi, Cileungsi menuju Cianjur, Pak, itu *traffic* nya sangat padat, sementara jalannya satu jalur, hampir setiap hari macet, Pak, ya. Jadi saya kira mungkin Pak Dirjen ada, ya katakanlah perencanaan juga untuk pengembangan atau peningkatan status jalan Cileungsi-Cianjur, Pak Dirjen.



Kemudian satu lagi terkait ini, Pak, apa namanya, sesuai dengan revisi Undang-Undang Jalan, Pak. *Nah*, di wilayah Jabodetabek, Pak, khususnya di wilayah Bogor Timur, Pak, itu banyak sekali jalan-jalan irigasi yang akhirnya kiri kanan itu menjadi pemukiman, Pak. *Nah*, status jalan ini kan dalam tanda petik masih menjadi bagian dari pengembangan sistem irigasi, Pak, ya, tapi menjadi wilayah komersial akhirnya. *Nah*, pemkot tidak mengakui, pemprov tidak mengakui, tapi dengan adanya revisi Undang-Undang Jalan ini kami berharap itu juga menjadi perhatian dari Pak Dirjen untuk diintervensi, Pak.

Kemudian terkait kepadatan Jagorawi, Pak, *nah*, barangkali mungkin (*suara tidak jelas*) juga harus ada proyeksi untuk membuat barangkali proyeksi *elevated* Jagorawi, Pak. Karena hampir setiap hari macetnya masih belum teratasi, Pak Dirjen.

*Nah*, terakhir untuk Pak Dirjen Bina Konstruksi juga mungkin termasuk Pak Dirjen Bina Marga, terkait IKN, Pak, ya. Sekali lagi barangkali, Pak Ketua pernah sampaikan, ini menjadi mitra siapa *nih* Ketua Otorita IKN, Pak, karena kalau misalnya sekarang alokasi anggaran sudah mulai diposisikan untuk pembangunan IKN, proyeksi ke depannya harus diperhitungkan, Pak. Jangan sampai dalam tanda petik, Pak, tidak ada kesinambungan yang maksimal. Sementara hari ini semua fokus seolah-olah IKN harus menjadi perhatian utama, Pak.

Jadi saya kira juga, Pimpinan, sekali lagi kami harapkan ada diundang lah ya Kepala Otorita IKN, supaya kita sekali lagi tahu *timetable* dan *action plan*-nya sehingga kita bisa mengikuti sebagai bagian dari Komisi V yang harus mengawasi kegiatan pemerintah.

Saya kira itu saja Pimpinan, terima kasih, mohon maaf melalui virtual, salam hormat untuk semua.

*AkhirulKalam,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh,*

#### **KETUA RAPAT:**

Makasih, Pak Mul.

Baik dari meja Pimpinan, Pak? Cukup? saya harus konfirmasi, daripada diinterupsi nanti sama dia. Silakan Pak Tamliha, terima kasih mas, cukup ya.

#### **F – PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Terima kasih Pimpinan,  
Pak Dirjen yang saya hormati,**

Saya langsung saja urusan dapil saya. Dari paparan yang disampaikan oleh Pak Dirjen Bina Marga, ada 10 program penanganan jalan yang disampaikan. Saya sudah menyampaikan ke Pak Dirjen, sejumlah permohonan jalan. Yang pertama FS dan DED Banjarmasin-Tabalong, sebagai penyangga IKN untuk jalan tol. Minta FS sama DED-nya saja, Pak, *enggak* banyak duitnya itu.

Yang kedua, Komisi V pernah ke Tabalong, pelebaran jalan Bandara Warokin Tabalong. Kemudian beberapa kali juga disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, pembangunan jembatan lintas Banjarbaru-Batulicin, minta bantuan kerangka bajanya. Karena APBN katanya tidak bisa menampung untuk keseluruhannya, maka gubernur meminta agar ya paling tidak rangka bajanya, sudah saya sampaikan semua.

Kemudian kunjungan kerja spesifik Komisi V, dulu Pak Menteri sudah menyetujui pembangunan jalan akses baru bandara internasional Syamsuddin Noor 2,8 kilometer, sudah ada surat gubernur. Kemudian pembangunan jalan Mataraman Sungai Ulin, Kabupaten Banjar, di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kemudian pembangunan jalan menambah jalur Dahai Mabu'un, ini juga hasil kunjungan kerja spesifik.

Kemudian, itu saja Pak Dirjen, kalau ini tidak tertampung, ini keterlaluhan. Saya tidak akan lebih daripada ratusan miliar. Saya berharap para Direktur beserta seluruh jajarannya, dan Pak Kepala Balai, mencatat betul semua usulan-usulan itu. Jangan menjadi tumpukan kertas di kantor yang tidak bermanfaat bagi umat dan rakyat. Terima kasih, Pak Dirjen Bina Marga, saya ingin menyampaikan bahwa Jembatan Paringin yang akan dibangun di dalam sini, duplikasi jembatan yang ada sekarang habyais diperbaiki 3 miliar, hampir runtuh kembali. Dan ini perlu menjadi bagian pembinaan dari Dirjen Bina Konstruksi.

Pengerjaannya memerlukan dan dimenangkan oleh pemenang tender dari Pulau Jawa, 3 miliar, Pak, dari pulau Jawa, kemudian 70% dari pagu. Akibatnya menjadi viral, itu satu-satunya jembatan yang menghubungkan Kalimantan Selatan ke Kalimantan Timur. Sekarang hanya mobil-mobil kecil dan sepeda motor, mulai hari ini boleh lewat di situ. Kalau sampai itu tidak diperbaiki dalam tahun ini, maka berdampak terhadap jalan kabupaten, jalan provinsi maupun jalan nasional yang lain, sebagai alternatif dari situ. Dan itu memerlukan biaya pemeliharaan perbaikan. Kemarin sebelum Komisi V ke Tabalong melihat jembatan itu, menjelang kami kunjungan, itu diperbaiki. Ya dipoles-poles sedikit lah, ternyata tidak tahan.

*Nah*, oleh karena itu, Saudara Dirjen Bina Konstruksi, kalau zaman Orde Baru, saya masih ingat bahwa pemenang tender itu yang mendekati pagu, bukan yang jauh di bawah pagu. Walaupun kata Profesor Soemitro, ada uang menguap 30%, tapi jalannya bagus, 25 tahun. *Nah*, yang sudah 25 tahun itu adalah jembatan penghubung Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah, Trans Kalimantan, Jembatan Barito, usianya sudah 25 tahun, Pak. Tapi belum

ada sepertinya pemerintah pusat mengantisipasi kalau jembatan itu tiba-tiba ambruk, akibat dari pengalihan jalan-jalan yang kontainer-kontainer itu melewati jembatan terpanjang se-Indonesia, zaman Pak Harto.

*Nah*, oleh karena itu, Bina Konstruksi, kalau jalan itu, jembatan itu, mestinya berusia 25 tahun, tapi ternyata 5 tahun pun apalagi sampai 2 bulan pun sudah runtuh kembali, itu kan celah korupsi. Dan bisa dibilang bahwa itu adalah korupsi. Oleh karena itu, Bapak perlu memberikan pembinaan.

Kepada Saudara Dirjen Bina Marga yang punya proyek, tolong diawasi, dibina, jangan setelah siapapun menang tender, dibiarkan saja terjadi-jadinya, sudah bebas dari KPK, selesai. Tapi dampaknya, akibat disubkan lagi, disubkan lagi, disubkan lagi, saya menghitung di Kalimantan Selatan, Pak Dirjen, hanya 50% infrastruktur itu dibangun dari pagu yang sesungguhnya, karena terlalu banyaknya itu. Ini jangan sampai terjadi, memang kita ada trauma di tempat ini. Tapi itu sebagai sebuah kebangkitan semangat bagaimana kita membangun yang lebih baik dan lebih transparan.

Kira-kira itu, Pimpinan, yang bisa saya sampaikan. Saya berharap apa yang sudah bolak-balik disampaikan setengah tahun ini saya di tempat ini, tidak masuk-masuk juga, ya bisa saja nantinya saya berpandangan bahwa Kementerian PUPR tidak akomodatif terhadap aspirasi rakyat. Kami tidak *ngiri*, Kalimantan Timur sampai 30-an jalan, Kalimantan Selatan cuma 10, bukan saya *ngiri* sama Pak Irwan, sama-sama Pak Irwan menyampaikan map, saya juga menyampaikan map. Tapi map saya itu ditaruh di mana, kalau susah mencarinya, nanti saya ikut mencarinya di kantor Bapak.

Terima kasih, mohon maaf jika tidak berkenan.

*Wallahumafiq iila aqwahitoriq,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

Mungkin supaya ada lagi, mengingatkan Bapak mengantar, silakan, Pak, catatan, usulan, atau mapnya hilang, mungkin tambah yang baru, Pak. Antar saja, Pak, sekarang, silakan, *nah, gitu* Pak, silakan.

Baik, selanjutnya Pak Ridwan dulu atau Pak Iwan dulu?

**F – P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Biar saya duluan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Ridwan.

**F – P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

*Makasih*, Pak Ketua.

Pak Dirjen, mungkin saya hanya satu saja. Tidak meminta, tidak apa, cuma saya memberi apresiasi dan terima kasih, Pak Dirjen Bina Marga. Karena dari tadinya 84 atau 86% itu tingkat kemantapan dan tahun 2023 ini diprogramkan bisa menjadi 94,20 (suara kurang jelas). Ini terima kasih, Pak, ya, menjawab apa yang pernah saya suarakan, kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu. Dan ya kalau yang lain masih ada sudah 96 atau 98, mudah-mudahan tahun berikutnya kita sudah bisa mencapai 98 dan 100%, bahkan tingkat kemantapan kita. Jadi sekali lagi, terima kasih, Pak Dirjen, mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana direncanakan.

Kedua, kedua Dirjen ini saya ingin menyampaikan, Pimpinan, kepala balai-balai sudah sangat bagus saya lihat, baik Binkon maupun Bina Marga. Karena mereka bekerja cukup agresif dan turun lapangan dengan aktif. Ini adalah saya yakin, ini akibat dari binaan Pak Dirjen, baik Dirjen Bina Marga maupun Dirjen Binkon.

Itu saja saya Pak, terima kasih, Pak Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

*Makasih, Pak Ridwan, Pak.*

**F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Andi Iwan.

**F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Terima kasih, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Andi Iwan Aras.

**F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

**Pimpinan beserta Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Pak Dirjen Bina Marga, Pak Dirjen Bina Konstruksi,  
beserta jajaran yang saya hormati,**

Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak, yang *alhamdulillah* Kepala Balai Jalan yang sekarang ini jauh lebih baik dan lebih responsif dari yang sebelum-sebelumnya, Pak. Sebelum itu juga saya ingin menanyakan, menyangkut masalah program yang ada dalam berkas ini. Ada 23 poin Pak Dirjen, apakah ini semua sudah berbentuk program atau masih dalam bentuk ditampung dulu kegiatannya atau *gimana*, boleh dijawab sekarang *enggak*, Pak Dirjen? Sudah terprogramkan ya, Pak? *Alhamdulillah*. Terima kasih banyak, Pak, kalau saya *ngelihat* ini, sudah satu Sulawesi Selatan ini masuk. Kalau seperti ini, *insyaallah* 2024 kami kepilih lagi nanti. *Barakallah*.

**KETUA RAPAT:**

Sudah selesai?

**F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Bentar *dong*.

**KETUA RAPAT:**

Oh belum.

**F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Ini Pak Ketua, saya kan *enggak* punya usulan, jadi ini *enggak* perlu cari tumpukan-tumpukan ini, sudah, tanpa diusul, Pak, ke Dirjennya, sudah mantap ini.

Kemudian, Pak, saya juga menyangkut masalah harga BBM yang tadi Bapak sampaikan, sehingga kemudian deviasi Bapak semakin jauh agak negatif, sebaiknya segera dapat penyelesaian. Kalau perlu saya setuju tidak perlu dieskalasi tapi dioptimalisasi mungkin ya, jadi pengurangan volume pekerjaan Pak tidak ada penambahan uang. Ataupun kalau bisa, sisa lelang Bapak atau paket-paket yang dibatalkan ditutup untuk kemudian menutupi masalah eskalasi tersebut.

Pertanyaannya, eskalasi ini sekarang mengacu dari harga yang mana? Karena penawaran orang juga berbeda-beda. Apakah kenaikan harga eskalasi nanti ini berdasarkan prosentase dari nilai penawaran atau langsung Bapak tentukan harga bahan bakar yang ada dalam pasaran sekarang, *gitu*. Kalau prosentase, saya kira kontrak orang masing-masing berbeda-beda mungkin, *enggak* terlalu jauh.

Kemudian, Pak, penyebab tol Maminasata di dicoret dari PSN, saya *pengen* tahu apa penyebabnya, itu kenapa dikeluarkan dari PSN kita. Dan kemudian yang terutama lagi, tadi Pak Syaifullah Tamliha juga menyampaikan

ke Bapak tentang hasil reses ataupun hasil kunjungan kerja spesifik yang kira-kira tidak atau belum mendapatkan perhatian dari Pak Dirjen. Kami harapan ke depan bisa tetap menjadi prioritas, Pak, karena kunker ini juga kami jangan sampai dianggap PHP oleh pemerintah daerah.

Saya terakhir juga ini mendapat apa Namanya, pesan dari Bupati Halmahera Selatan, karena kemarin kami kunsfik ke Provinsi Ternate yang mana kemudian pada saat itu dari Dirjen Bina Marga hanya ada Kepala Balai, Pak. Sehingga mungkin ke depannya kami harapan minimal untuk kunker spesifik sudah bagus, sebelum-sebelumnya Pak Thomas suka mendampingi, tapi kemudian yang kemarin itu mungkin saya *enggak* tahu *kenapa*. Dan kemudian di kunker reses juga kami harapan adalah dari Eselon I dari beberapa, apakah dari Dirjen Bina Marga atau Dirjen Bina Konstruksi atau Dirjen PSDA. Sehingga kemudian ini betul-betul menjadi prioritas buat kementerian, bukan sekedar kita menjalankan fungsi atau mematkan kewajiban saja dalam proses kunker tersebut.

Di Halmahera Selatan itu, Pak, ada Pulau Obi, yang mana juga disana ada proyek strategis nasional, proyek strategis nasional tentang tambang nikel. Tapi sampai sekarang, menurut bupatinya, jalan nasionalnya masih 0 kilometer, Pak. Mohon itu menjadi perhatian juga, karena saya kira cukup banyak sumbangsih atau kontribusi Pulau Obi terhadap pendapatan negara kita.

Selain daripada itu juga usulan-usulan, saya mendapatkan rekapitulasi usulan yang mana ternyata beberapa di antaranya bukan usulan saya, Pak, bukan usulan tertulis kami. Jadi nanti saya akan konfirmasi yang mana saja. Kemudian tapi malah yang kami usulkan tertulis justru tidak masuk dalam daftar yang Bapak berikan kepada kami. Termasuk misalkan yang di jembatan 45, memang ini lain lagi *nih*, Pak, jembatan 45 Kabupaten Wajo ini sebenarnya tidak di jalan nasional. Mungkin kami butuh diskresi dari Pak Dirjen. Bagaimana kemudian jalan tersebut, kemarin kami melakukan kunjungan kerja perseorangan dan didampingi oleh Kepala Balai Bapak di sana. Itu jarak tempuh kecamatan itu dalam kondisi sekarang ini, ke pusat kota memerlukan waktu sampai 30 sampai 45 menit. Tapi kalau jembatan ini jadi, Pak, 5 menit *nyampe*, karena hanya dipisahkan oleh sungai saja. Jadi kalau memang turunan Undang-Undang Jalan Inpresnya belum jalan, kira-kira dalam bentuk diskresi dari Dirjen Bina Marga bisa *enggak*, Pak, itu. Mohon bantuan Bapak. Kemudian apakah Inpres ini kira-kira bisa *enggak* tahun ini, Pak, mulai kita masukkan itu?

Kemudian yang terakhir, di sini karena saya lihat juga hadir Kepala BPJT dan Sekretaris BPJT. Saya ini kebetulan, Pak, ini mungkin kasus lama tentang akses jalan tol Tanjung Priok. Ada beberapa warga yang kebetulan Tanjung Priok ini banyak warga Sulawesi Selatan di sana, yang mendatangi kami, mempertanyakan tentang proses pembebasan lahan mereka yang belum selesai-selesai sampai sekarang. *Nah*, ini bahkan sampai ke tingkatan Mahkamah Agung dan mereka sudah menang diproses PK. *Nah*, ini yang kira-kira saya ingin mempertanyakan ke Pak Dirjen, siapa yang bertanggungjawab

terhadap proses pembebasan lahan tersebut? Bagaimana penyelesaiannya ke depan? Kira-kira itu untuk bisa kami beri jawaban kepada konstituen kami yang kebetulan berada di Jakarta, Jakarta Utara khususnya.

Kemudian untuk Pak Dirjen Bina Konstruksi. Tadi Pak Dirjen, kurang semangat *kayaknya* Bapak, agak *ngantuk*, Pak. Mengenai SKKMI Bidang Konstruksi, pemangku, saya sarankan ke Bapak, tidak hanya melibatkan KADIN, tetapi asosiasi-asosiasi konstruksi, Pak, atau konsultan, baik itu asosiasi profesi ataupun asosiasi perusahaan. Karena saya kira mereka yang lebih banyak berurusan dengan wilayah-wilayah ini. KADIN itu memang induk organisasi yang dilandasi Undang-Undang KADIN. Tetapi kemudian lebih banyak bersinggungan dengan usaha nonkonstruksi. Jadi saya kira Bapak harus lebih banyak melibatkan Gapensi, Gapeknas, Aspekindo, apapun itu namanya dan saya kira itu yang menjadi prioritas untuk Bapak dengarkan masukan-masukannya.

Kemudian menyangkut masalah *repeat order*, saya ingin penjelasan tentang penyelenggaraan penunjukan langsung permintaan ulang, ini seperti apa? harganya bagaimana? apakah misalkan *repeat order* itu apakah dia sudah mengerjakan kegiatan yang sama sebelumnya, kemudian diminta melaksanakan lagi, atautkah berdasarkan e-katalog atau apa? Saya *enggak ngerti*, tolong penjelasan Pak Dirjen juga menyangkut masalah itu.

Dan yang berikutnya menyangkut masalah sanksi terhadap kegagalan lelang, sanksi apa yang bisa Pak Dirjen berikan kepada balai-balai BP2JK di bawah Bapak, yang kira-kira dalam proses pelaksanaan lelang itu terdapat penyimpangan atau hal-hal yang kira-kira tidak dibenarkan. Karena ini ada contoh yang kurang bagus di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu pasar Tempe. Pasar Tempe ini kemudian dibatalkan kontraknya karena salah satu akibatnya karena kepengurusan dalam perusahaan, atau kalau saya tidak salah juga, tenaga teknik atau tenaga ahli dalam perusahaan tersebut yang duplikasi.

*Nah*, ini kan lucu, Pak, kalau sudah berjalan sekian persen pelaksanaan kegiatannya, lantas kemudian kontrak itu dibatalkan hanya karena kesalahan administratif yang Bapak buat atau BP2JK buat, *gitu*, Pak. Jadi yang kasian unornya, Pak, sudah *gitu* yang pasti kasihan lagi adalah masyarakatnya sendiri, bahwa kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

*Nah*, mengingat kondisi-kondisi yang tadi kembali saya ingin sampaikan, Pak, bagaimana kemudian proses pelelangan ini betul-betul Bapak mencari solusi agar supaya bisa menghindari rekanan-rekanan yang sekedar meminjamkan perusahaannya. Kemudian melakukan proses penawaran kepada Bapak dengan harga-harga yang kata Pak Roberth Rouw tadi, hanya bermodalkan kertas yang saya bilang kertas pun *enggak* kelihatan, Pak. Karena ini adalah apa namanya, kualifikasi apa, proses lelangnya elektronik.

Jadi saya kira itu harus Bapak cari solusinya, Pak, sehingga kemudian asas nyata atau aspek toloso saya kira masih perlu sedikit di situ. Walaupun

kita paham ada relaksasi lelang yang dari surat edaran Pak Menteri. Tapi kemudian jangan sampai membeli kucing dalam karung *gitu loh*, Pak. Kita orang sekedar memasukkan penawaran, kalau sekedar melihat angkanya saja saya kira tidak perlu ahli-ahli seperti Bapak untuk menentukan pemenang lelang, anak SMA juga tinggal *nunjuk aja* yang jelas siapa yang terendah, itu yang dimenangkan. Itu kalau misalkan seperti itu kondisinya. Jadi kita butuh ada semacam analisis teknis atau apa *gitu* yang kira-kira kita bisa mereduksi, Pak, mereduksi penawaran-penawaran yang terlalu rendah yang cenderung tidak bertanggungjawab.

Karena nantinya setelah dimenangkan, mereka kecenderungan mensubkonkan pekerjaan itu secara total, menjual. Jadi sudah dibanting sekian persen, dijual sekian persen, ya *gimana* kemudian kualitas pekerjaan ini bisa dijaga dengan baik. Walaupun betul, bahwa tidak ada alasan dari unor untuk mengurangi kualitas dengan harga penawaran yang rendah. Tapi ya bagaimanapun juga saya kira karena pengusaha ini adalah orientasinya profit, pasti mencari jalan, mencari cara, sekuat apapun pengawasannya kemudian tentu akan berusaha mendapatkan keuntungan, walaupun dalam tanda petik bisa mencuri volume ataupun speknya diturunkan.

Saya kira juga salah satu halnya adalah perpanjangan *blacklist*, Pak, jangan cuman setahun, dua tahun, Pak. Ya kalau perlu *blacklist*-nya selamanya. Kalau misalkan dia sudah pidana, itu sudah memalsukan dokumen dan lain sebagainya, karena ini kalau misalnya cuma setahun, dua tahun saya kira efek jeranya *enggak* ada dan kemudian terus-menerus nanti akan membuat orang mau tetap meminjamkan perusahaannya. Apalagi saya lihat banyak, Pak, rekanan-rekanan yang menang itu-itu saja. Jadi walaupun benderanya beda, tapi yang menang dia lagi, dia lagi, di paket ini dan bendera yang lain, tapi dia juga, dia juga, *gitu*. Jadi ini saya *enggak* tahu apa karena komunikasinya cukup lancar dan Pokja-Pokja yang ada di BP2JK atau tidak, karena suka atau tidak suka, terlalu banyak selentingan yang kami dengar, Pak, bahwa Pokja-Pokja di balai Bapak itu banyak bermain. Bahkan entah ada yang kami dengar sampai menyeter 2% dan lain sebagainya, ya. Saya *enggak* bisa membuktikan secara langsung, tapi selentingan kami dengar dan saya yakin Bapak juga dengar itu.

Kemudian, Pak, menyangkut masalah izin usaha, ini PP No. 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Resiko, saya kira memang sangat berat ya, dalam, sehingga kemudian saya kira banyak anggota-anggota atau rekanan-rekanan ini yang kemudian tidak lagi melanjutkan usahanya, karena mereka tidak akan dapat memenuhi jumlah tenaga teknik apapun itu yang dipersyaratkan dalam mendapatkan perizinan. Saya kira pertanyaannya, apakah persyaratan tersebut sudah, ini juga berkali-kali saya tanyakan, Pak, apakah pemerintah atau asosiasi-asosiasi yang sudah tersertifikasi oleh LPJK untuk memberikan sertifikasi kepada tenaga ahli tenaga teknik ini sudah memenuhi jumlahnya, kuotanya, untuk kebutuhan perizinan tersebut. *Nah*, jangan sampai perizinannya begitu susah mereka dapatkan, Pak, tapi kemudian dalam proses evaluasi lelang Bapak, itu sama sekali *enggak* ada



gunanya *gitu*, kasihan juga *nih* teman-teman mengurusnya susah, tapi kemudian gampang saja untuk dijatuhkan.

Selanjutnya, Pak, ada salah satu contoh *case* yang saya coba lihat menyangkut masalah sanggahan proses lelang. Saya minta, kalau ada sanggahan juga dijawab dan dibuktikan dengan benar, apa yang menjadi tuduhan-tuduhan, baik itu menyangkut hal-hal yang sepele, misalkan menyangkut masalah kemampuan dasar rekanan ataupun kemudian kontrak-kontrak yang menjadi pengalaman kerja yang dijadikan dasar untuk menganggap mereka lolos daripada proses lelang itu, seharusnya di, di, di, benar-benar diberikan jawaban yang bisa membuktikan tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Karena kalau tidak, saya kira nanti ke depan siapa tahu yang menyanggah ini bisa membuktikan seperti yang Pasar Siwa tadi, Pasar Tempe tadi. Jangan-jangan proyek berjalan sekian persen, dua puluh persen langsung putus kontrak lagi.

Mungkin itu, Pak Dirjen, kira-kira yang saya bisa sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke Ketua, terima kasih atas waktunya.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Iwan.

Mas Dewo ada yang mau disampaikan? Silakan, Mas.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Sebenarnya saya sudah *enggak* mau bicara. Tapi karena Pimpinan *kayaknya* semangat juga berbicara, itu pertanda tidak mau segera berakhir rapat kali ini, *kayaknya* Ketua juga bisa menangkap,

**KETUA RAPAT:**

Mas.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Psikologi saya.

**KETUA RAPAT:**

Cukup mas, sudah?

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Ya kalau disuruh cukup, cukup.

**KETUA RAPAT:**

Oh cukup.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Saya bicara,

**KETUA RAPAT:**

Mau bicara atau cukup?

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Ya, *tak* bicara sebentar.

**KETUA RAPAT:**

Oh sebentar, silakan.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Terima kasih.

Jadi kepada Dirjen Bina Marga, ini terus *nganu* saja *to the point* saja. Saya minta Dirjen Bina Marga bisa menunjukkan cara kerjanya, bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Bina Marga itu, wujud jalan ataupun jembatan adalah *output*-nya. *Outcome* nya adalah bagaimana jembatan dan jalan itu bisa memberikan pelayanan sebagai sarana transportasi darat. Bagaimana transportasi darat yang melewati jembatan maupun jalan itu bisa berjalan secara lancar, itu esensinya. Jadi tolak ukur daripada kerja Dirjen Bina Marga adalah itu. Bukan tolak ukurnya adalah hanya bagaimana mewujudkan adanya jembatan atau jalan. Kalau dalam proses pembuatan jalan maupun jembatan itu ternyata menimbulkan dampak kemacetan lalu lintas, artinya hasil daripada kerja Dirjen Bina Marga itu gagal. Jadi baik dalam kondisi jalan atau jembatan itu normal, maupun dalam proses pembangunan, lalu lintas itu tetap harus berjalan secara lancar.

Saya mengapresiasi BPJT yang melakukan penelitian bahwa kerugian negara akibat pelayanan jalan tol yang sering terjadi kemacetan, utamanya di pintu tol sebesar 4,4 triliun setiap tahun, itu dilakukan satu penelitian. Saya *enggak* tahu apa tiba-tiba BPJT melakukan penelitian ini, maksud dan tujuan dilakukan penelitian ini apa, *gitu*, saya *enggak ngerti*. Karena sudah sekian lama jalan tol itu operasional, tidak pernah dilakukan penelitian, tapi yang kali ini dilakukan penelitian, tapi itu tetap saya beri apresiasi. Kalau kerugian negara diakibatkan oleh kemacetan lalu lintas di jalan tol, pelayanan pemerintah yang

diamanatkan oleh undang-undang untuk memberikan pelayanan lalu lintas ini kan tidak hanya jalan tol. Tetapi juga jalan non-tol, baik jalan arteri nasional, jalan provinsi atau jalan kabupaten, tapi dalam hal ini kewenangan Kementerian PUPR adalah jalan arteri nasional.

Jalan arteri nasional, terjadi kemacetan di mana-mana, baik itu pada saat proses pembangunan jalan, jembatan, atau pada dampak-dampak atau faktor-faktor yang disebabkan oleh faktor lain, ya. Itu sering terjadi kemacetan di mana-mana. Bina Marga pernah *enggak* melakukan penelitian serupa, bahwa pelayanan jalan maupun jembatan itu merugikan negara sekian rupiah, sekian triliun, sekian puluh triliun atau mungkin ratusan triliun, akibat dari kemacetan itu. Ini *kayak* yang terjadi di dalam proses pembangunan jembatan Semarang-Demak, kemudian yang di Juwana begitu, kemacetannya berkilo-kilometer, terjadi beberapa jam, dan itu terjadi cukup lama, tidak hanya di dalam dua titik itu saja, terjadi di mana-mana di seluruh Indonesia. Tetapi tampaknya Dirjen Bina Marga tidak mempunyai satu upaya bagaimana supaya tidak terjadi kemacetan, paling tidak, tidak terjadi kemacetan dalam kategori parah. Misalnya pada saat pembangunan jembatan, ada jembatan darurat. Membangun jembatan darurat itu memang menggunakan *cost*, ada anggaran tersendiri. Tapi jika dibandingkan kerugian akibat kemacetan lalu lintas yang tidak memakai jembatan darurat, ini lebih besar mana kerugiannya, kan perlu ada satu perbandingan.

Jadi dalam kita bernegara ini tidak harus hanya berpikir ego sektoral. Kalau memang tupoksinya membangun jembatan, ya sudah, kita bangun jembatan. Soal dampak daripada saat pembangunan jembatan, itu bukan tupoksi saya, *nah*, itu namanya ego sektoral. Bagaimana satu sektor yang berupaya kita benahi, tapi juga tidak menimbulkan kerugian terhadap sektor yang lain, tidak mengganggu perekonomian, seperti itu. *Kan* kita memang punya pemikiran dan perencanaan yang sifatnya komprehensif, ya tidak hanya satu sektor saja yang dipikir, mengingat itu tupoksinya. Jadi saya minta Dirjen Bina Marga ya, benahi setiap pembangunan jalan maupun jembatan, bagaimana caranya, kalau memang harus tambah anggaran lagi untuk membuat jembatan darurat, itu harus dibangun, supaya tidak terjadi kemacetan yang berdampak kemacetan parah.

Kemudian yang kedua, saat pelaksanaan konstruksi jalan, ini saya juga memberikan masukan kepada Dirjen Bina Marga. Pekerjaan, baik itu preservasi maupun pembangunan, utamanya preservasi, itu juga berdampak terhadap kemacetan lalu lintas. Ini masih sangat konvensional, alat-alatnya yang dipakai sangat konvensional, tidak dalam kondisi fit, metode pekerjaannya juga konvensional ya bagaimana cara mengerjakannya supaya dalam satu titik itu bisa dikerjakan secara cepat, begitu. Kalau sudah jam 4 sore ya sudah berhenti bekerja, kemudian timbul kemacetan Panjang, dibiarkan begitu saja, tidak diterapkan bagaimana metode kerja yang sedemikian rupa, ya. Saya ingatkan bahwa pekerjaan itu juga ukuran dari peradaban suatu bangsa. Jadi kalau kerjanya jadul seperti itu kan ya, dilihat oleh negara-negara maju, Indonesia masih konvensional, berarti belum modern dalam pekerjaan konstruksinya. Ini kan juga, tetapi bukan itu esensinya. Yang

terpenting *tuh* bagaimana supaya pekerjaan itu cepat dikerjakan. Kalau memang konsekuensinya cepat itu harus dengan anggaran yang ditambah, tidak masalah. Karena untuk memberikan pelayanan kemacetan, supaya tidak terjadi kemacetan lalu lintas.

Dua hal ini saja, Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Mas Dewo, selesai sudah. Saya sedikit saja.

**Pak Dirjen yang saya hormati, Dirjen Bina Marga dan Bina Konstruksi beserta seluruh jajaran,  
Para Kepala Balai baik Balai Bina Marga maupun Balai Bina Konstruksi.  
Pimpinan dan Anggota yang saya cintai,**

Pertama soal mekanisme dulu, Pak Dirjen, nanti kesimpulan rapat kita tidak memuat angka-angka dulu, Pak. Tadi sudah disepakati di rapat terdahulu ya dengan Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan, hal yang sama pun nanti akan kita lakukan dengan Dirjen Sumber Daya Air. Ini untuk menindaklanjuti informasi dari teman-teman Direktorat Jenderal yang mengatakan bahwa di internal PU juga belum selesai antara Direktorat Jenderal dengan Pak Menteri. Jadi kita kasih kesempatan dulu untuk difinalisasi di sana, kesimpulannya seperti apa dengan yang kemarin kita sepakati di waktu di raker, Pak, itu yang pertama dulu.

Kemudian yang kedua, saya kembali ke dapil sedikit saja, Pak Dirjen, mungkin kemarin waktu kunjungan Presiden ke peresmian, apa namanya, pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat. Waktu itu disampaikan langsung oleh Dirut Pelindo, Pak, ya, terkait dengan optimalisasi pemanfaatan pelabuhan Kijing. Memang itu satu-satunya kita harus bikin tol ya, dari Pontianak menuju ke Kijing dan Singkawang.

Ini Pak Danang, tempo hari juga sudah kita sampaikan, dan waktu kunker pun ada dari BPJT mendampingi kami terkait hal ini. Mudah-mudahan ini segera kita sikapi, pelabuhannya cukup megah, Pak, ya, sangat besar sekali untuk pulau Kalimantan, sejauh ini menurut Pelindo ini yang terbesar. Dan *resources* yang begini bagus dan potensial, tentu kita harus bisa manfaatkan secara maksimal, Pak, untuk kemajuan ekonomi kita ya, terutama dari sektor Kalimantan untuk ekspor CPO, Pak. Dengan kondisi seperti itu saja target Pelindo sudah bisa 1 Juta ton/tahun, Pak, ya, itu tanpa jalan tol. Nanti kalau sudah ada jalan tol, bisa lebih besar, Pak, yang bisa diekspor CPO dari pelabuhan ini.

Kemudian untuk jalan nasional, saya terus mendorong ya optimalisasi terkait pelebaran jalan mulai dari Sekadau-Sintang ya, sekarang progress, Pak, mudah-mudahan ini bisa diteruskan. Sekarang ini Pak Dirjen, bus-bus yang masuk ke Peruruan itu sudah besar-semua, Pak, jadi bus-bus yang berbadan lebar semua *nyampai* ke Putussibau sudah, sementara jalannya sempit sekali

jadi memang sangat-sangat berbahaya. Tapi karena kebutuhan masyarakat ini, permintaan, memang kalau namanya *demand*-nya tinggi ya pasti orang akan *supply* kebutuhan itu ya, akhirnya kita yang harus menyesuaikan juga lah, untuk pelebaran jalan dari, terutama dari Sekadau sampai ke Putussibau lah. Memang sudah banyak, Pak, juga jembatan sudah hampir habis sebetulnya, Pak, sudah dilebarkan. Dan saya harap mudah-mudahan ini bisa diteruskan dan bisa kita tuntaskan.

Demikian juga untuk lintas tengah dan lintas utara ya, lintas utara saya lihat, terima kasih, Pak Dirjen. Saya lihat progresnya luar biasa dan mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan di 2024. Ya memang PR terbesar kita ada di lintas tengah, Pak, nanti mungkin saya lihat dari Malawi menuju ke Nangaela dan masuk ke Kalimantan Tengah, ini masih perlu kerja keras lah kita di sini. Namun demikian, tetap kita dorong, Pak, untuk terus ini kita lakukan sehingga program ini bisa kita selesaikan.

Saya rasa itu saja untuk Padat Karya, nanti kami akan rapat internal dulu Pak Dirjen ya, saya rasa tidak perlu kami perpanjang di sini. Nanti habis ini kita akan melakukan rapat internal di antara kapoksi, semua kapoksi ya. Mas Dewo, Pak Hamka ya, Pak Ridwan ya. Nanti untuk kita rumuskan Bersama, Pak, sehingga di raker nanti, di waktu raker dengan Pak Menteri, sudah bisa kita simpulkan dan bisa kita sepakati.

Saya rasa demikian, barangkali tambahan dari saya, ya. Baik, baik, baik, saya rasa demikian.

Saya persilakan mungkin Pak Dirjen bisa jawab secara singkat saja ya. Yang dianggap pandang perlu untuk dijawab, baik Dirjen Bina Marga maupun Bina Konstruksi. Saya persilakan Pak Dirjen, karena sudah malam juga kita.

**DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc):**

Baik, terima kasih, Pimpinan. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas segala kritikan dan juga masukan, ya, saya kira ini adalah sama-sama untuk kebaikan kita semua dan untuk pelayanan kita kepada masyarakat. Mungkin saya akan apa, yang penting-penting saja dulu, Pak Ketua.

Yang pertama adalah mengenai masalah usulan-usulan tol baru atau permasalahan dengan tol. Ini tol Pontianak-Kijing, maupun tadi dari Pak Tamliha saya kira Banjarmasin-Tabalong, Pak, ya. Jadi begini Pak, kita intinya adalah jalur yang paling cepat itu adalah dengan mengundang prakarsa, sama seperti kasus kita tol Puncak, Puncak Bogor, Pak, ya. *Nah*, kalau tidak ada memang tanda-tanda prakarsa, ini nanti tahun ini kita bisa lakukan pra FS dulu, Pak, di Bina Marga setelah itu nanti kita anggarkan FS tahun depan di BPJT. Karena begitu proses apa namanya, *solicity*, Pak. Kecuali kalau nanti ada pihak-pihak yang memang melakukan Prakarsa, itu bisa diambil oleh mereka nanti, bisa lebih cepat. Tapi kalau kita pakai *solicity*, nanti kita akan usahakan tahun ini, mungkin di sini ada Direktur Jalan Bebas Hambatan untuk segera

mengerjakan pra FS-nya. Jadi tahun depan kita bisa alokasikan FS di DJPI atau di BPJT. Dan saya kira memang sudah ada arahan dari presiden mengenai konektivitas Pontianak-Kijing itu, Pak, jadi kita akan dorong dan kita akan lihat, mungkin nanti perlu ada dukungan pemerintah untuk ini.

Kemudian tol Maminasata, ini yang pertama, Pak, ini kenapa kita keluarkan dari PSN, adalah karena ada arahan Pak dari Pimpinan, yang tidak selesai di tahun 2024 untuk dicek betul kelayakannya, ini kebetulan kelayakannya belum memenuhi, Pak. Jadi *problemnya* itu adalah kelayakan sama prioritas lahan, jadi untuk sementara ini kita keluarkan dulu dari PSN.

Kemudian mungkin *makasih*, Pak Dewo, atas masukannya, untuk yang ini mungkin saya sedikit koreksi, Pak, ya agar tidak salah tangkap oleh yang lain. Itu bukan kerugian negara, Pak, kalau ada kerugian negara, ini teman-teman BPJT sudah *enggak* ada di sini, Pak. Pasti ditangkap itu, Pak. Itu adalah kerugian pengguna jalan, Pak, jadi kerugian masyarakat sebenarnya. Jadi mungkin bisa disebut kerugian ekonomi akibat ini, karena kalau kerugian negara, jangan-jangan nanti langsung pada diambil ini, tidak boleh, Pak, kalau kerugian negara, Pak. Jadi ini memang ada kerugian, saya kira *statement* Pak Yongki pun saya *check* lagi, itu memang kerugian, tanpa negara, Pak, iya Pak. Itu penting saya kira, bukan apa-apa, untuk agar kita tidak ada yang salah persepsi mendengar ini, karena kerugian negara sangat sensitive, Pak, ya.

Baik itu saya kira Pak konteks BPJT itu karena kita memang akan melakukan *mult lane freeflow*, Pak. Jadi *kenapa* sekarang? Pasti masyarakat akan bertanya, *loh kenapa* harus pakai sistem yang baru ini daripada yang lama, kan *gitu* kan. *Nah*, makanya BPJT mengatakan, karena sistem yang lama ini merugikan anda semua, 4,4 triliun pertahun, *gitu*. Sehingga ini *worthy* untuk kita ganti dengan sistem *multi lane freeflow*. Artinya sistem yang baru ini adalah untuk menguntungkan pengguna jalan, Pak, itu intinya, Pak. Jadi 4,4 triliun itu adalah menunjukkan bahwa itu ada *lost* yang kemudian di *recover* kalau kita menerapkan *multi lane freeflow*. Tapi memang kadang-kadang teman-teman BPJT kalau *ngomong* saya juga *enggak* begitu paham, Pak, itu ilmunya tinggi-tinggi, Pak, di sana itu. Tapi kira-kira itu bahasa sederhananya, Pak.

Kemudian yang lain, saya kira tadi *makasih*, Pak Dewo, masukannya, itu memang perlu, Pak. Saya kira itu kritikan yang *justified*. Cuma saya boleh menjelaskan, Pak, memang kita ini sekarang ada dilema terkait dengan usia jembatan, sama tadi di Kalimantan, Jembatan Paringin, Pak ya. Kami juga mohon maaf, Pak, ya, karena memang usia jembatan kita itu kita desain 50 tahun, Pak. Ini banyak sekarang usia jembatan yang usianya 25-30 tahun, itu mengalami kerusakan dini terutama karena saya tidak mengatakan bahwa itu, tapi ada kontribusi kita, mungkin karena pemeliharaannya kurang pas, tapi juga karena bebannya melebihi dari beban rencana Pak akibat ODOL. Jadi yang mestinya 50 tahun, terpaksa kita sekarang harus ganti, karena kalau *enggak*, keburu putus malah, Pak. Jadi saya mohon, memang ada ketidaknyamanan bagi pengguna jalan ya, apalagi ini jalannya saya lihat jembatan Wonokerto ke kampungnya Pak Dewo ini, kebetulan saya pernah mampir kerumahnya *nih*,

Pak, jadi agak tahu sedikit. Mampir untuk makan pagi, Pak, bukan untuk apa-apa.

Jadi ini Wonokerto, kami mohon maaf betul, Pak Dewo. Karena ini memang tadinya kita mau bikin jembatan, ini empat lajur, Pak, ya jadi sekarang yang dibuka dua lajur. Tadinya kita memang mau membuat jembatan pengganti, tapi ini kondisinya ternyata tidak memungkinkan, Pak, di sini. *Nah*, kita sudah berusaha untuk alih ke jalan provinsi, *dilalah* di jalan provinsi juga ada perbaikan, jadi mereka juga keberatan. Ini memang kita ini seperti pantura kita dulu, Pak. Ya *kenapa* kita dulu paksakan bangun tol? Karena kita pengalaman, Pak, kalau pantura itu ada rusak jembatan, itu memang luar biasa macetnya, Pak. *Nah*, ini memang kita *milih*, apakah *nunggu* tol kita sampai ke Demak dan seterusnya selesai baru kita perbaiki, sehingga jalan penggantinya tol atau kita lakukan sekarang? Karena kami khawatir ini jembatan *keburu* runtuh, Pak, jadi kita ada sekitar 37 jembatan CH yang sekarang kita perbaiki secara serentak dengan KPBU. Untuk itu saya mohon maaf, saya kira kepada Pak Dewo dan juga masyarakat, kepada teman-teman juga, masyarakat di Kalimantan Selatan, Pak.

Kemudian mengenai jalan daerah, jadi begini, Pak, saya kira fundamental dari kita membuka pasal di Undang-Undang Jalan itu adalah memang untuk, menurut kami waktu itu adalah untuk menempatkan segala sesuatu kepada tempatnya kembali. Karena sekarang ini memang aturan di jalan ini, Pak, kalau di luar jalan nasional itu kan harus ada diskresi dan yang bisa mengeluarkan diskresi itu menurut PMK adalah menteri. Jadi saya *tuh enggak* bisa, Pak. Mengeluarkan diskresi itu harus menteri dan itu menimbulkan beban, beban *unnecessary load* lah kepada Pak Menteri. Oleh sebab itu, kita kemudian buat payungnya kan, Pak, di Undang-Undang Jalan itu. Dan kita buat rumahnya nanti melalui Inpres kan *gitu*, memang desainnya begitu. Jadi memang nanti ke depan, Pak, seperti jalan itu kita akan tempatkan di situ. Sehingga ini Pak Menteri merasa tenang siapapun menterinya itu, ya, dan jalan daerahnya juga memang ada alokasi khusus.

*Nah*, ini saya laporkan, Pak, jalan daerah ini memang saat kita usahakan 2023 sudah berjalan. Kita dengan Bappenas sudah sepakat ya, saya kira kita sudah satu persepsi, tinggal kita sekarang menyelesaikan Inpres, kemudian setelah Inpres baru kita bisa bicara alokasi anggarannya ke Kementerian Keuangan. *Nah*, kami berharap nanti Inpres ini hanya satu pasal saja, Pak, yang bermasalah, bisa kita selesaikan, Pak, sebelum 2023.

Cuma saya ingin sampaikan dengan sikap optimistik, Pak, kalau saya optimis ternyata itu ada, bahwa kita nanti betul-betul harus memastikan bahwa tahun depan itu *readiness* kriterianya sudah siap. Karena kalau *enggak*, juga *enggak* bisa dijalankan juga *gitu*, ada anggaran tapi *enggak* ada yang bisa dikerjakan. Jadi nanti untuk yang tadi saya kira seluruh jalan-jalan daerah nanti yang akan kita gunakan Inpres ini, kita sama-sama pastikan. Makanya saya instruksikan para Kepala Balai untuk kontak Bapak dan Ibu sekaligus. Artinya kita sama-sama cek *readiness* kriterianya, bahwa yang diusulkan itu memang sudah siap. Karena kita juga banyak pengalaman, jembatan gantung kan

*enggak* selesai-selesai karena tanahnya ternyata *enggak* bisa bebas-bebas, karena ternyata perusahaannya *enggak* mau melepas *gitu* kan, Pak.

Jadi tadi ada jembatan gantung, saya khusus bicara jembatan gantung, walaupun itu bukan *enggak* ada anggarannya, Pak. Kalau sudah dilelang, kita *nunggu* revisi DIPA, Pak. Revisi DIPA itu sekarang di Kementerian Keuangan, antre. Jadi harap sabar, Pak, karena banyak sekali yang direvisi, yang pertama adalah IKN, perlu revisi dan itu prioritas. Jadi yang lain harus *nunggu*, kemudian ada *automatic adjustment*, ada sisa lelang, saya kira banyak sekali. Dan selain ini yang baru selesai IKN, Pak, jadi yang lain harap bersabar. Kita pun sama, Pak, kesal juga ini, karena kita penyerapan jadi lambat juga, Pak.

Kemudian saya kira isu-isu lainnya, saya kira itu mungkin, Pak, yang intinya, Pak, kalau yang itu nanti saya kira nanti yang butuh data terlalu detail nanti kami jawab secara tertulis, izin, Pak Ketua, kalau,

**KETUA RAPAT:**

Baik.

**DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc):**

Diizinkan, Pak, saya kira terima kasih saja.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

**DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc):**

Halmahera Selatan, memang mohon maaf ini juga jadi perhatian kami, tapi ada hal yang mungkin nanti kita sampaikan, Pak, dibalik ini Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Pak Dirjen Bina Marga, ya. Saya menekankan sedikit terkait dengan jalan daerah, teman-teman sekalian ya sudah dipesankan kepada para Kepala Balai, jangan sampai nanti ini aturannya sudah siap, anggarannya sudah ada, tapi *readiness* kriterianya tidak terpenuhi, ini saya garis bawah dulu. Jangan sampai nanti ini kita *ngusulkan kok enggak* diterima, padahal *readiness* kriterianya tidak terpenuhi, di masing-masing yang di tempat yang diusulkan. Sudah ada perencanaannya belum dan seterusnya, itu maksudnya.

Jadi nanti teman-teman sekalian, baik yang hadir secara fisik di sini maupun secara virtual, saya pesankan melalui kapoksi dan Pimpinan yang



hadir, untuk kita, yang diusulkan yang betul-betul memang sudah siap dan sudah dikomunikasikan dengan balai masing-masing. Ya ini saya pesankan.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Supaya nanti tidak di kita timbul lagi pro kontra, *kenapa kok* kemarin dibilang boleh tapi *kok enggak* bisa dilaksanakan *gitu loh*. Jadi ini saya perlu penegasan.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Pendek saja, Mas.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Iya, terima kasih. Ini penting sekali, Pak, kita berbicara soal Inpres. Diingatkan oleh dirjen, bahwa Inpres akan berlaku pada tahun 2023. Tapi ada dua persyaratan Inpres itu bisa berjalan, yaitu *readiness* nya memenuhi kriteria, yang kedua adalah ada anggarannya. Andai kata *readiness*-nya kriterianya itu sudah memenuhi, kemudian anggarannya itu didapat dari mana? Sementara pada tahun 2023 itu adalah tahun anggaran berjalan. Jadi saya berharap, ada dari pemerintah, dari Bina Marga, anggaran yang memang betul-betul disiapkan untuk itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Pak Dirjen, mungkin ini perlu dijawab sedikit apa yang disampaikan.

**DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc):**

Kembali bahwa *problem* kita kan *budget constraint*, Pak. Jadi kita memberikan ruang untuk daerah itu kan, kenapa kita *bikin* Inpres, memang kita ada alokasi khusus, karena isu jalan daerah itu bukan hanya isu Bapak-Bapak, isu kami juga, *gitu*. Karena kita melihat, sekarang ini ada penumpukan kegiatan di sepanjang tol koridor, kan. Tapi umpamanya berapa puluh kilometer, karena konektivitas kurang bagus, itu *enggak*, terbangkitkan, *gitu*. Jadi ini konsen kita juga, Pak, jadi kita sama-sama saya kira *fight* bagaimana agar ini dialokasikan *gitu*. Tapi jangan sampai *gitu* kan, bukan saya terlalu optimis. Jangan sampai

nanti kalau anggarannya ada malah tanahnya *enggak* siap, desainnya *enggak* ada, Amdalnya *enggak* ada, ya *podo wae* Mas, jadinya kan *enggak* jalan juga.

Jadi saya kira *gitu*, intinya ya kita berharap, tapi jangan sampai nanti kalau ada berapapun itu jangan sampai nanti malah *enggak* ini juga *gitu* kan *gitu*. Itu karena banyak kita, kita pengalaman jembatan gantung kan, Pak. Ada berapa jembatan gantung, ya tanahnya yang punya pabrik, pabriknya *enggak* mau lepas kan *gitu*, kan. Iya jadi gantung banyak itu, Pak, kejadian, jadi gantung *bener*, *enggak* mau dipindah, *gitu*. Nah, jangan sampai nanti karena apa ini kan pekerjaannya lebih *major* daripada jembatan gantung kan. *Gitu*, Pak Ketua, maksudnya.

**KETUA RAPAT:**

Baik, saya rasa sudah bisa kita pahami semua ya, tugas kita semua ya, diperlukan.

**F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Pak Ketua, Pak Ketua. Sedikit.

**KETUA RAPAT:**

Ini jembatan gantung apa jembatan timbang ini?

**F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Iya betul, jembatan gantung.

**KETUA RAPAT:**

Oh gantung, silakan jangan panjang-panjang ya, Pak, ya.

**F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Iya, terima kasih.

Pak Dirjen, untuk jembatan gantung akan jauh lebih baik kalau koordinasi dengan masing-masing Kepala Balai. Karena mereka yang paham di dapil kita masing-masing, sekian.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya baik, saya rasa sudah dipahami semua oleh kita ya. Terkait soal ini, sekali lagi teman-teman sekalian ya, ini ada peluang untuk mudah-mudahan

kita doakan Inpresnya cepat selesai dan anggarannya ada. Ya, demikian, saya tidak perlu pertajam lagi, sudah sangat jelas.

Silakan, Pak Dirjen Bina Konstruksi, mungkin ada hal yang perlu disampaikan dari pendapat dan saran yang dikemukakan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi V, saya persilakan, Pak.

**DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR (Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):**

Terima kasih, Pimpinan.

Ini mungkin saya yang penting-penting saya perlu sampaikan, terkait dengan kemudahan untuk perizinan berusaha. Seperti kita ketahui, untuk itu kan perizinan berusaha sekarang dilakukan oleh LSBU dan LSP, jadi berbeda dengan yang dulu dilakukan di LPJK. *Nah*, ini untuk perizinan ini memang sekarang permasalahannya untuk LSBU dan LSP ini, rekomendasinya sudah dilakukan oleh LPJK. Namun, untuk proses di BNSP ini agak sering terhambat karena belum adanya standarisasi ataupun sistem yang dapat mengakomodir ini.

Namun, ini memang untuk kriteria persyaratannya sesuai dengan PP 5 ataupun PP 14, sehingga memang di situ idealnya untuk suatu badan usaha itu memang mempunyai persyaratan minimum. Sehingga ini memang nanti badan usaha jasa konstruksi ini diharapkan betul-betul memang mempunyai profesional dan kinerja yang baik. Contohnya adalah ketersediaan peralatan, kemudian tenaga ahli, dan juga nilai penjualan. Karena banyak sekarang ini perusahaan juga yang istilah saya, ini ada yang plat merah, plat hitam, dan plat kuning. *Nah*, plat kuning ini yang disewa-sewa, tetapi tidak pernah melakukan apa namanya, perbaikan terhadap kinerja badan usaha itu. Tentu dengan diberlakukannya aturan ini nantinya diharapkan ada seleksi alam, sehingga badan usaha yang ikut jadi pemenang ataupun peserta lelang ini betul-betul memang yang *qualified*.

Kemudian kaitan dengan beberapa pertanyaan kaitannya dengan pelatihan tadi. Ini untuk sertifikasi, tentu ini dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi, sesuai dengan PP No.14, di mana program kerja BJKW terkait dengan pelatihan tenaga kerja konstruksi untuk tenaga terampil, yang kemarin terkendala tidak dapat dilakukan dengan segera, ini ada kaitannya dengan standar biaya untuk sertifikasi. Sehingga nanti Bapak-Ibu ketika akan melakukan, apa, untuk sosialisasi pelatihan tenaga terampil ini di dapilnya masing-masing, ini bisa disesuaikan dengan jadwal reses mungkin, karena kemarin ini permasalahannya terkait dengan standar biaya itu. Dan ini tentu nantinya bisa dilakukan berdasarkan lokasi yang ada, balai jasa konstruksi wilayah, seperti di Papua untuk wilayah Papua dan Maluku, kemudian Sulawesi di Makassar, kemudian di Jawa Timur, BJKW Jawa Timur dan di Kalimantan di Banjarmasin, serta di Jakarta, dan Palembang, serta di Banda Aceh.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Pimpinan, izin, Pimpinan. Bisa dijelaskan, Pak?

**DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR (Ir. YUDHA  
MEDIWAN, M.Dev.Plg):**

Iya.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Upah, upah, kalau di Jawa Tengah berapa, Pak, itu per harinya?

**DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR (Ir. YUDHA  
MEDIWAN, M.Dev.Plg):**

Ini kaitannya yang pertanyaan Bapak tempo hari. Ini kalau untuk uang saku ini berkisar antara 85.000 sampai 135.000, Pak, iya. Jadi sesuai dengan PMK Menteri Keuangan. Yang jadi masalah adalah ketika ini untuk *transport*, Pak. *Nah*, ini *transport* kemarin yang diberikan itu karena tidak ada bukti, itu menjadi temuan BPK. Sehingga itu tidak direkomendasikan untuk diberikan lagi. Kecuali misalnya nanti dari lokasi tertentu kita yang menyediakan bus untuk ke lokasi pelatihan, *nah*, ini bisa dipertanggungjawabkan.

Jadi karena kemarin itu ada biaya komponen, biaya *transport*, dan uang saku harian, kalau dijumlahkan menerima cukup besar. *Nah*, yang masalah sekarang adalah biaya *transport* itu tidak dapat diberikan, kalau tidak ada bukti. Kecuali ada bukti, misalnya tiket bus atau taksi, *nah*, ini yang bisa di SPJ-kan itu Pak.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Mohon maaf, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Mas, saya rasa *ndak* perlu diperpanjang, silakan.

**F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Oke, iya. Ya sebenarnya ini juga sulit untuk kita implementasikan kalau standar upahnya ternyata masih jauh di bawah daripada dia bekerja setiap harinya. Kemudian kalau transportasi, bukti harus distandarkan seperti transportasi di perkotaan, taksi atau bus, memang itu susah untuk diwujudkan. Karena mereka kan dari desa-desa dari kampung-kampung, *gitu*, Pak. Coba ada solusi begitulah, karena kan memang *real* nya dia juga melakukan satu transportasi, *gitu*.

**KETUA RAPAT:**

Ya Pak Dirjen, coba.

**DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR (Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):**

Iya, Pak, ini sedang kita pikirkan. Jadi yang memungkinkan adalah menggunakan kendaraan Bersama, misalnya dari domisili peserta ke lokasi pelatihan, dan ini ada bukti *real* bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau masing-masing individu menerima seperti yang pelatihan yang lalu-lalu, ini hasil audit BPKP yang sedang berjalan ini menjadi temuan, Pak, dan itu potensi kerugian negara.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Pak, saya rasa cukup Pak Dirjen soal ini, nanti.

**F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Pak.

**KETUA RAPAT:**

*Bentar-bentar*, saran saya *gini*, Pak. Ini sistem keuangan kita kan sudah jelas sebetulnya ya. Yang mana yang melanggar, yang mana yang tidak, yang salah diperbaiki. Intinya kalau Mas Dewo tadi *nyampaikan*, kalau memang pengeluaran mereka *tuh* harus kita ganti ya kita ganti, tinggal caranya bagaimana *gitu loh* yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar ketentuan aturan main keuangan negara. Saya pikir itu saja, kalau ada yang harus diperbaiki, diperbaiki *ngono toh*, Mas. Yang penting masyarakat yang datang, biayanya tergantikan, baik ongkos kerja harusnya dia bekerja maupun biaya transportasi yang keluar, tinggal mekanismenya saja yang dibuat, Pak.

Saya rasa mekanismenya saja yang perlu diperbaiki, saya rasa *enggak* perlu diperpanjang, ini sangat teknis *banget* ini dan bukan, ya silakan saja, kalau misalnya jadi temuan kan Bapak yang bikin kegiatan yang kena temuan. Kalau tidak mau terulang lagi, ya diperbaiki sesuai saran baik BPK maupun BPKP. Saya rasa begitu saja, cukup ya, soal ini ya?

**F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Pak Willem.

**F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Pak Ketua, sedikit.

**KETUA RAPAT:**

Iya, jembatan gantung lagi atau jembatan timbang lagi?

**F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Tidak.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Terkait dengan Dirjen Bina Konstruksi ini, saya mau tanya, apakah untuk wilayah Sumatera Utara sama Sumatera Barat itu sudah terbentuk atau belum? sudah ada atau belum?

**KETUA RAPAT:**

Iya, bisa diperjelas, Pak Willem.

**F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Balai, balai.

**KETUA RAPAT:**

Hah, balai?

**F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):**

Karena tadi saya belum sempat dengar tadi, tadi saya hanya dengar Aceh.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Dirjen.

**DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR (Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):**

Baik, Pak. Jadi kalau untuk Balai Jasa Konstruksi wilayah ini, hanya tujuh, Pak, jadi *region*, tidak setiap Provinsi ada. *Nah*, untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu BJKW nya di apa, lingkup kerjanya di Aceh. Sehingga nanti sekalipun, pelatihannya tidak harus di Aceh, bisa di lokasi di Sumatera Barat nanti BJKW Aceh yang akan datang ke Sumatera Barat atau Sumatera

Utara. Begitu juga untuk provinsi yang lainnya seperti Lampung, Bengkulu, itu dijadikan satu di Sumatera Selatan, BJKW-nya.

**KETUA RAPAT:**

Kalau Papua, di mana, Pak?

**DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR (Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):**

Papua ada sendiri, Pak, di Jayapura.

**KETUA RAPAT:**

Di Jayapura, di Papua, sendiri di Jayapura, Pak Willem. Ya Bapak dapat prioritas, Pak, di sana, ya, ya. Pasti dia lebih bagus dari jembatan timbang, Pak.

Cukup Pak ya? Ya cukup ya? Pak Dirjen masih ada?

**DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR (Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):**

Sedikit, Pak, ini kaitannya dengan SKKNI tadi. Jadi SKKNI ini kami bekerja sama dengan Kadin ini sebagai *cost sharing*. Tetapi untuk pelaksanaan substansinya, kami bekerja sama dengan asosiasi, yang seperti Bapak sampaikan KADIN, kemudian juga Gapeknas, Gapensi. *Nah*, dan juga kami melibatkan praktisi untuk *expert*, kemudian akademisi untuk penyusunan SKKNI dan skemanya ini. Sehingga ini hanya *cost sharing* nya, untuk karena APBN terbatas, target-target yang sebanyak kurang lebih 250 itu masih banyak sisa yang belum bisa diselesaikan. Sehingga kami mencari terobosan, bekerja sama dengan KADIN.

Kemudian kaitannya dengan ROPK ini, Pak, ROPK ini suatu terobosan, ini seperti yang diminta oleh Pak Menteri, untuk BUJK yang bekerja dengan kinerja baik dan layak mendapat apresiasi dapat dilakukan penunjukan kembali. Tetapi dengan dasar bahwa ini ada substansi yang kita atur, yaitu kriteria dan batasan paket. Jadi artinya paketnya tidak melebihi nilai paket sebelumnya dan batasannya. Jadi pekerjaan yang hampir serupa dan sejenis. Dan juga badan usaha mana yang dapat dilakukan penunjukan kembali serta kriterianya seperti apa, ini yang mengisi adalah PPK yang lama. Jadi ada empat kriteria terkait dengan ROPK ini. Diharapkan dengan ROPK ini, maka akan ada memberikan semangat kepada BUJK yang bekerja baik dan ini tentunya akan memberikan kesempatan mereka berlomba-lomba bekerja baik dan ini bisa dilakukan penunjukan Kembali, kalau memang penilaiannya baik. Jadi tidak boleh melewati pagu yang sebelumnya. Boleh, pasti, asal tidak misalnya nilai kontrak sebelumnya 100 miliar, dia di ROPK-kan untuk pekerjaan yang 500 miliar, itu tidak memungkinkan, boleh.

**KETUA RAPAT:**

Cukup? Mungkin, Pak Iwan?

**F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Yang tadi pertanyaan saya.

**DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR (Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):**

Mungkin mengacu ke harga penawaran sebelumnya.

**F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Benar, mengacu pada harga penawaran kontrak sebelumnya, berarti?

**DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR (Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):**

Kontrak sebelumnya.

**F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Oke.

**KETUA RAPAT:**

Cukup, dinda? Baik Bapak-Ibu sekalian, Bu, Bapak sudah? Cukup? Masih ada?

**DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR (Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):**

Masih ada, Pak, ini.

**KETUA RAPAT:**

Ya, silakan.

**DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR (Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):**

Untuk misalnya gagal lelang ini sanksinya apa? yang seperti disampaikan Pak Iwan Aras tadi. Bahwa kami tidak main-main ini, kalau gagal lelang kita lihat dari apakah itu kesalahan dokumen atau tata cara evaluasi atau memang ada masalah lain. *Nah*, ini kita lakukan audit bersama Irjen, dan kalau



itu ternyata kesalahannya ada di Pokja, kami tidak segan-segan untuk meng-*grounded*, Pak. Sudah banyak ini Pokja kami yang kita *grounded*, termasuk Kepala Balai dan Kasubbag TU. Namun kalau bila itu kesalahannya dokumen lelang yang dari PPK menyerahkan, ini konsekuensinya lain. Termasuk misalnya ada penolakan dari PPK, ternyata Pokja benar, berarti sanksi dari Inspektorat Jenderal kepada PPK yang, PPK.

**KETUA RAPAT:**

Nanti mungkin bisa diperjelas di tertulis, Pak, Bapak uraikan di tertulisnya, kami bisa baca runutnya dan kita bisa melakukan pengawasan di rapat berikutnya. *Ndak*, maksud saya yang soal yang ini tadi *loh*, Pak. Bapak silakan lanjut, tapi yang tadi, mekanismenya itu kan.

**DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR (Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Harus runtut *banget gitu*, Pak. Kalau Bapak jelaskan *gini*, kita juga *enggak, enggak* bisa menyimpan, karena ini panjang ya menyangkut aturan, sanksi dan seterusnya, kan *gitu*. Silakan dilanjutkan, Pak.

**DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR (Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):**

Kemudian mungkin ini untuk merespon yang Pak Bakri dari Jambi, Pak. Untuk pembatalan lelang ini, karena yang di Jambi ini ternyata ada *blacklist* yang berlaku surut. Jadi ketika sudah ditetapkan, itu badan usahanya itu masuk *blacklist*. *Nah*, ini yang jadi, sehingga dibatalkan pemenangnya adalah yang cadangan satu.

Ada juga yang pembatalan lelang karena *refocusing*, seperti yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, melakukan *refocusing*, padahal ini sebetulnya sudah dilelang dan akan diusulkan untuk penetapan. *Nah*, ini kembali lagi kepada pemilik paket pekerjaan. Sehingga kami ikut memproses, kalau memang itu sesuai dengan permintaan dari unor atau dirjen terkait. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Pak. Untuk hal-hal yang lain nanti akan

**F – PAN (H.A. BAKRI, HM., S.E.):**

Interupsi.

**DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR (Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):**

Kami sampaikan secara tertulis.

**F – PAN (H.A. BAKRI, HM., S.E.):**

Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F – PAN (H.A. BAKRI, HM., S.E.):**

Iya *makasih*, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Singkat, Pak, ya.

**F – PAN (H.A. BAKRI, HM., S.E.):**

Iya, iya singkat.

**Pak Yudha,**

Iya yang jadi pertanyaan saya itu, rutinitas terus, *gitu*, Pak. Apakah tidak ada sistem yang lebih cermat *gitu*? Karena *gini*, Pak, itu tidak segampang itu lari dari yang menang ini, dibatalkan, karena ada masalah, dilarikan ke pemenang kedua, ini punya waktu juga. *Nah*, ini yang kadang-kadang, dua masalah ini yang terjadi di Jambi ini terpengaruh, Pak, apalagi itu pembangunan fisik sekolah, Pak. Aduh, saya terus-terang saja, Pak, sampai saya itu minta pengawas dari seluruh kepala sekolah yang mendapat kegiatan itu, karena takutnya terlambat ini.

*Nah*, maksud saya, ini Jambi *nih kok* dua kali, 2021, 2022, *nah*, ini kejadian. *Nah*, oleh sebab itu, saya tidak tahu mudah-mudahan, *enggak* tahu *nih*, Pokja ini juga sudah lama sekali, Pak. Semenjak berdiri Pokja, apa namanya BP2JK, di Indonesia ini, di Jambi ini, itu orangnya belum pernah diganti-ganti. Maksud saya, diganti lah, karena omongan di luar sudah tak enak, Pak. Apa salahnya *sih*, *ndak* perlu saya sebut namanya, nanti saya kasih, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Langsung saja, sasarannya pasti ini yang terakhir ini kan kalimatnya?

**F – PAN (H.A. BAKRI, HM., S.E.):**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Iya, maksudnya kalimat yang terakhir kan?

**F – PAN (H.A. BAKRI, HM., S.E.):**

Kalimat yang terakhir, nanti diserahkan.

**KETUA RAPAT:**

Segera ganti, *kan gitu*.

**F – PAN (H.A. BAKRI, HM., S.E.):**

Hahaha.

**KETUA RAPAT:**

*Kan gitu* tadi.

**F – PAN (H.A. BAKRI, HM., S.E.):**

*Makasih*.

**KETUA RAPAT:**

Ya sudah cukup kan? Ya *udah enggak* usah panjang-panjang, Pak, kekar pendek. Pak Ridwan? *Eh*, Pak Ridwan, Pak Andi Iwan, masih ada yang mau ditanggapi? Hah, sudah? masih ada? kalau masih ada, *monggo*. Cukup? Baik, sudah malam ini. Draf kesimpulan, poinnya sedikit.

DRAF KESIMPULAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI  
DENGAN DIRJEN BINA MARGA DAN DIRJEN BINA KONSTRUKSI  
KEMENTERIAN PUPR  
RABU, 31 AGUSTUS 2022.

1. Komisi V DPR RI meminta Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk meningkatkan capaian serapan APBN tahun 2022 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI, di mana capaian per bulan Agustus 2022 sebagai berikut:
  - Dirjen Bina Marga: Realisasi keuangan 35,53% dan fisiknya 44,69%. Ini sesuai data yang masuk di tempat kita.
  - Dirjen Bina Konstruksi: Realisasi keuangan 53,39% dan fisiknya 56,91%.
2. Komisi V DPR RI bersama Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR sepakat bahwa program dan kegiatan pada Tahun

Anggaran 2023 diprioritaskan antara lain hasil dari kunjungan kerja dan masukan serta usulan Komisi V DPR RI.

3. Terkait dengan peningkatan alokasi anggaran dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2023 Komisi V DPR RI meminta Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk menambah alokasi program infrastruktur berbasis masyarakat.

Teman-teman komisi, setuju ya, sama apa tadi? Adinda Iwan?

**F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Iya, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Cukup? baik. Pak Willem, cukup, Pak, ya? ya saya ketok.

**(RAPAT: SETUJU)**

Ya nanti kita lanjutkan lagi jembatannya. Pak Dirjen, cukup Pak ya? Bina Konstruksi?

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik, dengan demikian selesailah rapat kita pada malam hari ini, ya dari siang sampai malam.

Sebelum saya akhiri, saya beri kesempatan untuk menyampaikan kata-kata penutup. Silakan, baik Dirjen Bina Marga atau, ya, iya *nah*, Bapak kelihatannya Pak Dirjen Bina Konstruksi. Saya persilakan, Pak.

**DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR (Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):**

Baik.

**Bapak-Ibu Pimpinan Komisi V dan Anggota Komisi V DPR RI,**

Kami atas nama Kementerian PUPR, saya Dirjen Bina Konstruksi dan Dirjen Bina Marga, mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan paparan dan memberikan masukan.

Kami berharap ke depan ini dapat bisa menjadi lebih baik, sehingga masukan-masukan yang dari Bapak-Ibu berikan tadi, dapat menjadi proses dari pemrograman lebih lanjut ke depannya. Mungkin itu saja, tidak panjang lebar.

Terima kasih, Pimpinan, sekali lagi.

*Wabillahitaufig walhidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

*Makasih.*

**Pak Dirjen Bina Marga,  
Dirjen Bina Konstruksi dan seluruh para direktur yang hadir,  
Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati seluruh jajaran,  
Kepala-kepala Balai, baik Balai Bina Marga maupun Bina Konstruksi di  
daerah, yang kami hormati,**

Saya atas nama Pimpinan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas rapat kita pada siang sampai malam hari ini. Dan mohon maaf, Pak Dirjen, manakala dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan ya, baik dari sikap dan tutur kata kita selama rapat ini berlangsung.

Demikian Bapak-Ibu sekalian, maka selesailah rapat kita pada malam hari ini. Dengan mengucap syukur *alhamdulillah*, rapat saya nyatakan selesai dan saya tutup.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua,**

**(RAPAT DITUTUP PADA 20.40 WIB)**

**JAKARTA, 31 Agustus 2022**  
a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

**NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.**  
**NIP. 196912021998032002**